

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
HUKUM ADAT DI DESA TANAH TOWA KECAMATAN KAJANG
KABUPATEN BULUKUMBA**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Islam Jurusan Peradilan Agama
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh

UDMA LAELA
NIM. 10100107045

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2011

ABSTRAK

Nama : Udma Laela

NIM : 10100107045

Judul Skripsi : Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Skripsi ini merupakan studi penelitian lapangan yang membahas tentang “Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan *Field Research* yakni mengambil data-data dari lapangan yang berhubungan langsung dengan penelitian kemudian mengolahnya dengan metode kualitatif dan induktif. Selain itu, penulis juga melakukan *Library Research* yakni dengan mengambil data-data dari buku-buku dan berbagai literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) faktor penyebab kawin di bawah umur di Desa Tanah Towa (2) perkawinan di bawah umur menurut hukum Islam dan Hukum adat (3) penyebab yang ditimbulkan perkawinan di bawah umur.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: (1) faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur adalah faktor adat dan budaya, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor agama. (2) Perkawinan di bawah umur ditinjau dari hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai *baligh* antara antara kedua calon suami-isteri, sebagaimana secara tegas dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) Sedangkan perkawinan di bawah umur ditinjau dari hukum adat tidak menentukan batasan usia atau umur tertentu bagi orang yang melaksanakan perkawinan. (3) Perkawinan di bawah umur ini memberikan dampak dalam kehidupan rumah tangga baik dari kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Selain itu juga, upaya pencegahan perkawinan di bawah umur.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 15 Agustus 2011

Penyusun,

UDMA LAELA
NIM: 10100107045

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba” yang disusun oleh saudari **UDMA LAELA**, Nim: 10100107045, mahasiswa Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2011 M, bertepatan dengan 23 Ramadhan 1432 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan Agama.

Makassar, 08 Februari 2012 M

15 Rabiul Awal 1433 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.	(.....)
Sekretaris	: Abd. Halim Talli, S. Ag., M. Ag.	(.....)
Munaqisy I	: Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Drs. Azman, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Drs. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: A. Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.

NIP. 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan *Taufiq* dan *Hidayah*-Nya, sehingga proses penulisan skripsi yang berjudul ***“Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”*** ini dapat terselesaikan meskipun dalam pembahasan dan uraian yang sangat sederhana.

Shalawat dan *Taslim* atas junjungan Nabi besar Muhammad saw, sebagai *rahmatan lil alamin* dan *uswatun hasanah* yang telah membawa ummat manusia dari alam kehidupan jahiliyah menuju alam kehidupan ilmiah yang lebih beradab yang senantiasa mendapat ridha Illahi.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik berupa motivasi yang bersifat moril maupun materil, penulisan skripsi ini tidak dapat terwujud seperti yang ada sekarang ini. Sederetan nama dan pihak yang sangat berjasa telah dengan ikhlas membantu penulis sampai dengan terselesainya study penulis.

Pertama-tama penulis haturkan terimah kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. A. Qadir Gassing HT MS, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
3. Abd. Halim Talli, S.Ag., M.Ag., dan Dra. A. Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

4. Drs. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag., dan Dra. A. Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing satu dan pembimbing dua penulis.
5. Segenap dosen, staf dan karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, yang telah memberi pelayanan yang simpatik dan berbagai kemudahan sejak kuliah hingga detik terakhir penyelesaian studi penulis di kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Bapak Sultan selaku Kepala Desa Tanah Towa beserta jajaran dan tokoh-tokoh masyarakat yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan.

Penghargaan utama dan ucapan terima kasih yang mendalam, penulis haturkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta H. Muh. Saleh Hasan dan Ibunda tersayang Hj. Sitti Fatimah yang telah melahirkan, membesarkan dan selalu mengiringi setiap langkah penulis menempuh pendidikan.
2. Demikian pula ucapan terima kasih kepada Pimpinan Apotik Madani Farma, Drs. Ambo Marusu beserta Istrinya Dra Hasniah. Dan Muh. Yusuf Hasan yang telah memberikan banyak nasehat, motivasi dan dorongan yang tak ternilai kepada penulis.
3. Saudara-saudari penulis Rahmat Faisal beserta istrinya Irnawati, Agus Salim Faisal beserta istrinya Hijrawati, Ulfa Mutiah yang tak bosan-bosannya memberikan nasehat serta motivasi yang lebih kepada penulis.
4. Ucapan terima kasih pula penulis haturkan kepada Keluarga besar dan keponakan tercinta Muh. Rifqi Attaya Rahmat yang begitu banyak memberikan semangat dan motivasi.

5. Rekan-rekan Mahasiswa terkhusus Angkatan 2007 Jurusan Peradilan, Unhi, Vera, Iin, idha, whia, Rara, Kiki, Icha, Anha dan seluruh Crew PA 07 Community dan teman-teman lain yang tidak bisa disebut namanya satu persatu yang selalu berbagi suka maupun duka. (Love You All)

Sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekhilafan dan kekeliruan, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentunya jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran yang konstruktif penulis sangat harapkan guna kesempurnaan tulisan ini. Akhirnya kepada semua pihak yang tak dapat disebut satu persatu, penulis ucapkan banyak terimah kasih. Semoga Allah swt memberikan pahala dan menjadikan kita cinta kepada ilmu dan mengamalkannya. Amien.

Makassar, 1 Agustus 2011

Penulis

Udma Laela

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1-14
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Hipotesis	5
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II : GAMBARAN TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA TANAH TOWA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA	15-43
A. Gambaran Umum Desa Tanah Towa	15
B. Pelaksanaan Perkawinan di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.....	21
C. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur.....	39

BAB III : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT MENGENAI	
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR.....	44-60
A. Pengertian Perkawinan.....	44
B. Pandangan Secara Biologis dan Psikologis Tentang Masa	
Dewasa.....	53
C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Perkawinan Di	
Bawah Umur	56
BAB IV : ANALISA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA TANAH	
TOWA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA	
.....	61-78
A. Analisa Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur	61
B. Analisa Dampak Perkawinan Di Bawah Umur	69
C. Solusi Penyelesaian Masalah Perkawinan Di Bawah Umur	75
BAB V : PENUTUP	79-80
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

TABEL I : Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur di Desa Tanah Towa

TABEL II : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Tanah Towa

TABEL III : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat pendidikan di Desa Tanah Towa

TABEL IV : Data Tentang Banyaknya Pencatatan Perkawinan

TABEL V : Data Perkawinan di Bawah Umur di Desa Tanah Towa Mulai Dari 2006-
2010

TABEL VI : Dampak-Dampak Perkawinan di Bawah Umur di Desa Tanah Towa



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan Allah SWT sehingga di dalam kebutuhan biologisnya diatur dalam hukum perkawinan. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk melakukan hubungan diantara lawan jenis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Hal ini diharapkan agar manusia di dalam berbuat tidak menuruti hawa nafsu saja. Dan selain itu, sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dilahirkan kedunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup.

Banyak suruhan-suruhan Allah SWT dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman-Nya dalam Q.S an-Nuur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h. 718.

Islam memberi wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut dengan syariat Islam yaitu perkawinan yang sah.

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal dimana manusia dapat beranak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT, telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Dengan demikian, dalam mewujudkan tujuan perkawinan masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif.

Sebagaimana firman Allah SWT, Surat An-Nisa Ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (periharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²

Adapun perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

² *Ibid*, h. 77.

³ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam lingkungan Peradilan Agama* (Cet. 4; Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikmah, 2001), h. 123.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah masak jiwa raganya agar perkawinan tersebut dapat dipertahankan, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun materiil. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai batas umur atau baligh. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa member nafkah kepada isteri dan anaknya).⁴

Sedangkan tujuan lain dari perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani manusia sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga pencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadi perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan.

Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan perkawinan telah ditentukan di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan yaitu “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”. Ketentuan batas umur ini seperti yang disebutkan dalam Kompilasi pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon

⁴ H. Andi Syamsu Alam, *op. cit*, h.18.

suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.⁵

Di lain pihak Hukum Adat di Kajang Misalnya tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Biasanya seorang anak dinikahkan ketika ia dianggap telah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya. Dan ini seringkali tidak terkait dengan umur tertentu. Bahkan hukum adat di Kajang membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak tersebut masih berusia kanak-kanak yang biasa disebut kawin gantung. Hal ini dapat terjadi karena di dalam hukum adat perkawinan bukan saja merupakan persatuan kedua belah pihak tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat. Adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan kanak-kanak tidak menjadi masalah di dalam hukum adat di Kajang karena kedua belah pihak itu akan tetap mendapatkan bimbingan oleh keluarganya.

Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan penulis sebagian besar masyarakat di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang kabupaten bulukumba masih melaksanakan perkawinan di bawah umur. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, faktor-faktor tersebut, yaitu karena faktor adat dan budaya, faktor ekonomi, faktor agama, faktor pendidikan, faktor dijodohkan oleh kedua orang tua, dan faktor kemauan anak.

Perkawinan di bawah umur ini sangat menarik untuk diteliti, terlebih lagi di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang yang merupakan kampung penulis. Fenomena

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005) , h.76-77.

yang terjadi memperlihatkan banyaknya perkawinan di bawah umur tanpa memikirkan dampak yang bisa ditimbulkan. Oleh sebab itu penulis mencoba mengangkat persoalan yang terjadi dalam masyarakat dengan judul skripsi “Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu pokok masalah yaitu : “Bagaimana Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba“, adapun sub masalahnya adalah:

1. Bagaimana faktor penyebab kawin di bawah umur di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ?
2. Bagaimana perkawinan di bawah umur ditinjau dari hukum Islam dan hukum Adat?
3. Sejauh mana penyebab dan dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba?

C. Hipotesis

Dengan latar belakang masalah yang ada, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan, berupa jawaban sementara, dengan jalan hipotesis dalam kaitannya dengan permasalahan diatas yaitu :

1. Masyarakat di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang kabupaten bulukumba masih melaksanakan perkawinan di bawah umur. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur,

faktor-faktor tersebut, yaitu karena dijodohkan oleh kedua orang tua, faktor adat dan budaya, faktor ekonomi, faktor agama, faktor pendidikan, dan karena faktor kemauan anak.

2. Perkawinan di bawah umur ditinjau dari hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai *baligh* antara antara kedua calon suami-isteri, inheren dengan syarat-syarat perkawinan. Salah satu syarat sah perkawinan adalah telah mencapai usia *baligh* harus meliputi kemampuan fisik dan mental, sebagaimana secara tegas dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, adalah konsep pemikiran hukum Islam tentang usia perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”. Dan selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Sedangkan perkawinan di bawah umur ditinjau dari hukum adat tidak menentukan batasan usia atau umur tertentu bagi orang yang melaksanakan perkawinan.
3. Perkawinan di bawah umur merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan diidealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan di bawah umur juga jelas beresiko lebih besar daripada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan usia. Perkawinan di bawah umur tidak hanya dapat berakibat negative terhadap kedua belah pihak mempelai, tetapi juga berdampak pada anak hasil perkawinan di bawah umur, keluarga dan masyarakat.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih mengerti akan makna judul yang dibahas oleh penulis, dirasa perlu dikemukakan lebih dahulu batasan atau penjelasan mengenai pengertian judul tersebut yang terdiri atas beberapa fase sebagai berikut :

“Perkawinan atau Pernikahan” yang dalam literature fiqh berbahasa arab disebut dengan kata dua kata, yaitu *nikah* atau *zawaj* sedangkan arti kata *nikah* berarti bergabung dan juga berarti akad atau perjanjian. Jadi, “perkawinan” menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah atau “perkawinan” ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.⁶ Sedangkan dalam “perkawinan” menurut hukum adat ialah suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat.⁷

“Di Bawah Umur” yang dimaksud yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Jadi, perkawinan di bawah umur adalah pernikahan yang di lakukan oleh seorang pria dan seorang wanita di mana umur salah satunya masih di bawah umur batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang. Dan kedua calon mempelai

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Mas, 2003), h. 73.

⁷ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia ; Dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 222.

tersebut belum siap secara lahir maupun bathin serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

“Hukum Islam” adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi pemeluk Islam.⁸

“Hukum adat” adalah kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).⁹

“Desa Tanah Towa” merupakan salah satu Desa dari 19 Desa di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Daerah ini beriklim tropika basah dengan temperatur rata-rata 26,6° berada antara suhu maksimal 34° C dan minimum 21,1° C, mempunyai dua jenis musim yakni musim kemarau dan musim hujan dengan kelembaban udara rata-rata 27,4° C. Desa Tana Towa Kecamatan terletak di bagian utara Kecamatan Kajang, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sinjai. Luas wilayah Desa Tana Towa ± 729 ha.

Jadi, yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah perkawinan di bawah umur menurut hukum Islam dan Hukum Adat di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 42.

⁹ Tolib Setiady, *op. cit*, h. 6.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan ini membahas tentang “Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”. Setelah menelusuri berbagai referensi yang berkaitan dengan pembahasan ini, penulis menemukan beberapa buku, yaitu :

1. Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menyatakan bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia mengandung arti Hukum Perkawinan Islam menurut yang berlaku secara khusus di negara yang bernama Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk Undang-Undang yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Buku ini berbicara tentang Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang perkawinan. Hukum Perkawinan Islam itu menurut Islam. Islam itu hanya satu dan berlaku bagi seluruh dunia dan sepanjang masa.
2. Drs. Ahmad Rofiq, M.A., dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia* membahas tentang hukum Islam yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum perkawinan dimana salah satu di dalam pembahasan dijelaskan bahwa pada umumnya langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *masalah mursalah*. Penetapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat ini dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam.
3. Dalam buku *Fiqh Sunnah 6* karya Sayyid Sabiq yang dialihkan bahasakan oleh Moh Thalib, menyatakan bahwa di dunia dewasa ini umur orang kawin rata-rata

24 tahun bagi perempuan dan para laki-laki 28 tahun. Umur tersebut menurutnya umur yang sangat relative dan paling tengah-tengah.

4. H. Andi Syamsu Alam dalam bukunya *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* membahas tentang keluarga sakinah, merupakan suatu model atau *performance* keluarga yang dicita-citakan oleh setiap orang, baik yang telah melangsungkan perkawinan maupun yang belum. Salah satu ikhtiar mewujudkan keluarga sakinah adalah melangsungkan perkawinan pada usia yang sudah matang. Sebab, usia yang sudah matang akan mempengaruhi kematangan *psikhis* seseorang.

Meskipun tidak menentukan batas usia tertentu yang paling ideal untuk melangsungkan perkawinan, Islam sangat menekankan arti penting kematangan dan kedewasaan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga yang tidak pernah sunyi dari badai dan gelombang kehidupan. Suami isteri yang telah matang, baik fisik maupun psikhis tentu akan mampu mengatasi berbagai problema kehidupan yang menerpa kehidupan rumah tangga.

5. Telah ada beberapa buku dan juga kitab-kitab fiqih yang mengkaji pernikahan dalam Islam yang membahasnya dalam bab munakahat mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan, baik masa pra pernikahan maupun pasca pernikahan sebagai ajang pembentukan keluarga. Aturan-aturan tentang pernikahan itu ada yang cukup rinci dan ada yang bersifat global. Salah satu aturan yang bersifat global itu adalah tentang batasan usia baik laki-laki maupun perempuan, sehingga banyak menimbulkan perbedaan baik dari Imam Madzab maupun Ahli Fiqh. Hal ini terkait dengan perbedaan pendapat tentang masa taklif, yaitu ketika seseorang dianggap sudah baligh (dewasa) dan dikenal kewajiban secara hukum.

6. Soerjono Soekanto dalam bukunya *Hukum Adat Indonesia* membahas tentang dimana hukum adat atau hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Hukum adat tetap berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat walaupun hukum tertulis dalam perkembangannya telah mengatur bagian tertulis dalam perkembangannya telah mengatur bagian terbesar dalam aspek kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, hukum adat mempunyai fungsi mamfaat dalam pembangunan (hukum) karena: hukum adat merumuskan keteraturan perilaku mengenai peranan, perilaku-perilaku dengan segala akibat-akibatnya dirumuskan secara menyeluruh, dan pola penyelesaian sengketa yang kadang bersifat simbolis.

Pokok masalah yang di bahas oleh penulis telah pernah dibahas oleh penulis lain sebelumnya, namun penulis akan membahas pada objek penelitian yang berbeda.

F. Metode Penelitian

Dalam mengumpulkan data dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan, sebagai berikut :

- a. Pendekatan *Syar'i*, yaitu pendekatan dengan memperhatikan ketentuan syaria'at Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadits.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu metode pendekatan yang selalu memperhatikan peraturan yang ada dan masih berlaku.

2. Metode pengumpulan data/penulisan

- a. Dalam mengumpulkan data penulis mempergunakan metode *Library Research*, metode ini dimaksudkan, bahwa penulis mengumpulkan data referensi-referensi yang relevan, kemudian mengambil bahan-bahan tertulis atau kutipan-kutipan dari sekian pendapat atau masalah yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.
- b. *Field Research*, yaitu suatu pola pengumpulan data di lapangan dengan memilih Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Dalam penelitian ini penulis mengemukakan data melalui metode :
 1. Interview, yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara dengan warga masyarakat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
 2. Observasi, yaitu suatu cara dengan mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap hal yang sesuai dengan pembahasan.

3. Metode pengolahan data/penulisan

- a. Metode komparasi, yaitu metode yang dipergunakan untuk membandingkan antara satu data dengan data yang lain. Dalam hal ini mungkin ada data yang didukung atau hanya sekedar diadakan pengkrompromian, sehingga tidak saling bertentangan kemudian mengambil suatu kesimpulan.
- b. Metode induksi, yaitu dengan jalan membahas dan meneliti persoalan yang bersifat khusus, kemudian mengadakan generalisasi kepada hal yang lebih umum, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan pengertian universal.

- c. Metode deduksi, yaitu dengan jalan membahas dan meneliti persoalan yang bersifat khusus dari segi pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik dan ditemukan suatu kesimpulan secara deduktif.

G. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan yang diharapkan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengingat bahwa, persoalan perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna, tetapi sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan perkawinan di bawah umur. maka sadar akan hal ini, penulis bermaksud memahami dan mengetahui realitas yang ada di masyarakat secara tepat dan teliti yang dalam kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- b. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan tersebut dan sebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang, dampak dan solusi yang dari permasalahan perkawinan di bawah umur.
- d. Merupakan upaya agar kiranya masyarakat, khususnya diri sendiri terdorong untuk merasa lebih memiliki ilmu ini sebagai cara atau pengetahuan yang sangat berguna ini.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dengan penelitian ini nantinya diharapkan penulis benar-benar memahami tentang perkawinan, salah satunya adalah masalah perkawinan di bawah umur dan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat secara luas.
- b. Diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran terhadap masyarakat Desa Tanah Towa agar lebih hati-hati dalam melaksanakan perkawinan.
- c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi siapa yang membaca skripsi ini dalam memperkaya kebudayaan.



BAB II

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA TANAH TOWA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Kajang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba, sebagaimana terungkap dalam UU. Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) dan UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473), yang telah diubah dan disempurnakan melalui UU. Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara geografis letak wilayah Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berjarak sekitar 213 km dari Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada koordinat antara $119^{\circ} 58'$ sampai dengan $120^{\circ} 28'$ bujur timur dan antara $05^{\circ} 2'$ sampai dengan $5^{\circ} 40'$ lintang selatan. Daerah ini beriklim tropika basah dengan temperatur rata-rata $26,6^{\circ}$ berada antara suhu maksimal 34° C dan minimum $21,1^{\circ}$ C, mempunyai dua jenis musim yakni musim kemarau dan musim hujan dengan kelembaban udara rata-rata $27,4^{\circ}$ C.

Kecamatan Kajang terbagi atas 19 Desa dan salah satunya adalah Desa Tanah Towa yang dijuluki *Kamase-masea* atau *Dompea*, karena di dalamnya terdapat kawasan adat *Ammatoa* dengan ciri khas berpakaian hitam-hitam, dan mempunyai hukum adat yang sangat kuat serta masih dipatuhi, ditaati dan dihormati oleh komunitas adatnya. Desa Tanah Towa mempunyai luas wilayah administrasi seluruhnya ± 729 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batunilamung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Malleleng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bontobaji
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pattiroang

Berdasarkan informasi yang diperoleh selama penelitian, Desa Tanah towa terdiri dari Sembilan (9) dusun yaitu

- Dusun Balagana
- Dusun Jannaya
- Dusun Sobbu
- Dusun Benteng
- Dusun Pangi
- Dusun Bongkina
- Dusun Tombolo
- Dusun Lurayah
- Dusun balambina

Di samping itu, diperoleh pula keterangan bahwa penduduk Desa Tanah Towa, lebih banyak wanita daripada laki-laki, yakni laki-laki sekitar 2.197 jiwa (45,88 %) dan wanita sekitar 2.592 jiwa (54,12 %) jadi, jumlah keseluruhan

penduduk Desa Tanah Towa Pada Tahun 2010 sebanyak 4.789 jiwa. Terhadap penduduk atau warga Desa Tanah Towa yang masih kental dengan hukum adatnya.

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN UMUR

No.	Umur	Jumlah
1.	0 – 12 Bulan	21 Jiwa
2.	1 – 4 Tahun	260 Jiwa
3.	5 – 6 Tahun	185 Jiwa
4.	7 – 12 Tahun	543 Jiwa
5.	13 – 15 Tahun	286 Jiwa
6.	16 – 18 Tahun	283 Jiwa
7.	18 – 25 Tahun	628 Jiwa
8.	26 – 35 Tahun	724 Jiwa
9.	36 – 45 Tahun	486 Jiwa
10.	46 – 50 Tahun	381 Jiwa
11.	51 – 60 Tahun	335 Jiwa
12.	61 – 75 Tahun	310 Jiwa
13.	>75 Tahun	347 Jiwa

Sumber : Data monografi Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Desember 2010.

Di samping itu, harus pula diingat bahwa Desa Tanah Towa mendapat julukan sebagai *Kamase-masea* atau *Dompea*. Akan tetapi di Desa Tanah Towa, terdapat hamparan lahan yang relatif cukup luas dan menjadi salah satu faktor utama yang

mempengaruhi kehidupan warganya. Masyarakat Desa Tanah Towa dalam kehidupannya mempunyai mata pencaharian dalam mencukupi kebutuhan hidupnya melakukan berbagai macam pekerjaan seperti uraian di bawah ini:

TABEL II
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1209 jiwa
2.	Pedagang/Wiraswasta	94 jiwa
3.	Pelajar	528 jiwa
4.	Pengrajin	335 jiwa
5.	PNS	38 jiwa
6.	Peternak	257 jiwa
7.	Buruh tani/bangunan	533 jiwa
8.	Tidak/belum bekerja	1795 jiwa
JUMLAH		4. 789 Jiwa

Sumber : Data monografi Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Desember 2010.

Desa Tanah Towa sebagian terbesar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani baik selaku petani berdasi (tuan tanah) maupun selaku petani penggarap. Pekerjaan lain yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tanah Towa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah berdagang, peternak, buruh tani atau bangunan dan pengrajin sarung hitam. Oleh karena itu, hal ini merupakan salah satu aktivitas dalam meningkatkan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,

seseorang tidak hanya diberikan motivasi untuk berusaha menjadi pegawai negeri saja, tetapi juga diberi dorongan kepada mereka di bidang wiraswasta untuk semakin berkembang ke depan.

Dibandingkan dengan Petani, peternak, dan pengrajin sebagian besar masyarakat Desa Tanah Towa tidak atau belum bekerja yaitu 37,49 %. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil hanya 0,80 % dari jumlah mata pencarian keseluruhan yang paling rendah sedangkan pelajar yaitu 11,03 % dari keseluruhan mata pencarian.

Mengenai masalah perekonomian dan sumber kehidupan masyarakat Desa Tanah Towa menganut sistem perekonomian tradisional dimana para warganya hanya memusatkan kegiatan ekonominya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Namanya saja sistem ekonomi tradisional, maka alat yang digunakan untuk kegiatan ekonomipun terkesan sederhana dan masih begitu jauh dari modern, seperti halnya alat penenun sarung hitam atau "*lipa lelleng*" yang masih menggunakan teknologi manual ataupun cara mereka bertani dan menggarap sawah yang masih menggunakan kerbau sebagai tenaga penggarap. Meskipun begitu, masyarakat Kajang tidak pernah merasa susah karena kegigihan mereka dalam melakukan serangkaian kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perekonomian di Desa Tanah Towa diklasifikasikan kedalam kelompok perekonomian agraris dengan hasil utama padi yang disimpan di atas loteng rumah mereka sehabis panen. Selain itu, mereka juga mengandalkan hasil perkebunan mereka seperti kakao, buah buahan dan lain-lain. kemudian dari pemanfaatan hutan dan peternakan seperti sapi dan kebo juga bisa menjadi sumber pendapatan walaupun biasa ada yang tidak diperjualbelikan.

Penduduk Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba rata-rata berpendidikan rendah, hal tersebut dapat dilihat dari table berikut:

TABEL III
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Tidak/belum sekolah	2872	59,99 %
2.	Tidak tamat SD	523	10,91 %
3.	Belum tamat SD/Sederajat	525	10,96 %
4.	Tamat SD	632	13,20 %
5.	SLTP/Sederajat	111	2,31 %
6.	SLTA/Sederajat	101	2,12 %
7.	Diploma	15	0,32 %
8.	Sarjana	9	0,19 %
9.	S2	0	0,00 %
JUMLAH		4789	100,00 %

Sumber : Data monografi Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Desember 2010

Dari hasil presentase tersebut dapat lihat betapa terpaut jauh antara masyarakat Desa Tanah Towa yang berpendidikan Diploma, S1 dengan yang tidak/belum sekolah, tidak tamat SD, belum tamat SD/Sederajat, tamat SD sampai dengan SLTA/sederajat yaitu 99,49 %.

Dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Kajang sebagaimana halnya masyarakat yang lainnya adalah mayoritas memeluk agama Islam. Demikian pula

halnya dengan desa Tanah Towa yang penduduknya mayoritas adalah suku konjo yang berdialek Makassar, maka mayoritas memeluk agama Islam.

Walaupun penduduk Desa Tanah Towa mayoritas memeluk dan meyakini salah satu agama yang diyakini keberadaannya, dalam kehidupan masyarakatnya khususnya penduduk asli daerah ini sebagian besar diantara mereka masih sering melakukan kegiatan-kegiatan dan upacara sakral yang bukan bersumber dari ajaran Islam itu sendiri. Menyembah bebatuan, pohon dan sebagainya, upacara-upacara kelahiran, kematian, perkawinan, dan panen sebagainya yang dalam pelaksanaannya nampak adanya pengaruh-pengaruh tradisi masyarakat yang kurang sesuai dengan ajaran Islam.

Adanya kepercayaan akan adanya kekuatan ghaib dan roh-roh halus yang memiliki kekuatan sakti (supranatural) dalam alam semesta ini, oleh karena itu pada hari-hari tertentu sebagian diantara penduduk melakukan serangkaian upacara , baik dengan tujuan menolak bahaya (tolak bala), meminta rezeki, maupun dengan tujuan memohon bantuan dari kekuatan sakti tersebut.

Agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang, ini merupakan warisan dari pendahulu mereka. Agama yang mereka anut dalam hal ini sangat tercermin dari budaya yang melatarbelakangi kehidupan mereka.

B. Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Sebagaimana dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya izinkan jika pihak pria sudah

mencapai umur 19 (sembilang belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun dalam praktiknya di Kecamatan Kajang, masih ditemukan adanya perkawinan di bawah umur. Perkawinan dimaksud, dikategorikan sebagai perkawinan anak-anak.

Berkenaan dengan pentingnya perkawinan di Kecamatan Kajang, diperoleh data bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir (2006 – 2010) tercatat sebanyak 1.700 perkawinan. Hasil pelaksanaan pencatatan perkawinan dimaksud, digambarkan secara transparan dalam tabel berikut ini.

TABEL IV
DATA TENTANG BANYAKNYA PENCATATAN PERKAWINAN

No.	Tahun	Banyaknya	Persentase (%)	Keterangan
1.	2006	275	16,18	Terendah
2.	2007	285	16,76	
3.	2008	350	20,58	
4.	2009	360	21,17	
5.	2010	430	25,29	Tertinggi.
	Jumlah	1.700	100,00	

Sumber data : Kantor KUA Kecamatan Kajang, Tahun 2011.

Sehubungan dengan data yang tergambar pada tabel 4 tersebut, diketahui bahwa keadaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung mulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 terdaftar sebanyak 1.700 perkawinan (100 %) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang.

Data di atas, memberikan gambaran statistik dengan grafik/trend naik. Dimana pada tahun 2006 tercatat sebanyak 274 perkawinan (16,18 %) sebagai angka

terendah, sedang pada tahun 2010 tercatat sebanyak 430 perkawinan (25,29 %) sebagai angka tertinggi. Kemudian pada tahun 2007 tercatat sebanyak 285 perkawinan (16,76 %), pada tahun 2008 tercatat sebanyak 350 perkawinan (20,58 %), dan pada tahun 2009 tercatat sebanyak 360 perkawinan (21,17 %).

Pencatatan perkawinan dimaksud, sebagai hasil kerjasama antara Penghulu (Imam/Pembantu Pejabat Pencatat Nikah) dengan Kepala KUA kecamatan Kajang dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bulukumba (Pasal 2 ayat (2) UU. Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 PP. Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam).

Angka statistik tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan di atas, belum atau tidak termasuk pelaksanaan perkawinan dibawah umur. Oleh karena hakikat dari perkawinan dibawah umur, memang sejak dari semula dengan sengaja tidak dicatat atau didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah. Namun diduga bahwa pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Kecamatan Kajang, relatif tinggi khususnya di Desa Tanah Towa.

Dari penelusuran data di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang mulai Tahun 2006 sampai 2010 diperoleh data sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

TABEL V
DATA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA TANAH TOWA
2006-2010

No.	Nama		Umur		Pendidikan		Tanggal menikah	Alamat
	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri		
1.	Nahang	Satu'	17 thn	14 thn	SMP	SD	18-1-2006	Dusun Benteng
2.	Baho	Ansa	15 thn	15 thn	SD	SD	18-1-2006	Dusun Balagana
3.	Sahir	Sakina	18 thn	13 thn	SD	SD	4-3-2006	Dusun Benteng
4.	Tibai	Upa	15 thn	13 thn	SMP	SD	18-1-2006	Dusun Lurayah
5.	Tahang	Sahoria	17 thn	15 thn	SD	SD	2-3-2007	Dusun Tombolo
6.	Hamsing	Lina	19 thn	15 thn	SMP	SD	23-3-2007	Dusun Benteng
7.	Canra	Sunirmi	18 thn	16 thn	SMP	SMP	11-7-2007	Dusun Balambina
8.	Uddin	Eda	18 thn	14 thn	SMP	SD	8-2-2008	Dusun Jannaya
9.	Sangkala	Sidar	20 thn	15 thn	SMP	SD	13-12-2008	Dusun Benteng
10.	Adi	Ida	15 thn	12 thn	SD	SD	30-1-2009	Dusun Pangi
11.	Ansar	Bolong	21 thn	13 thn	SMP	SD	30-1-2009	Dusun Sobbu
12.	Baha	Syamsia	13 thn	14 thn	SD	SD	18-1-2010	Dusun Benteng
13.	Siing	Suharni	19 thn	15 thn	SMP	SD	24-2-2010	Dusun Bangkina
14.	Palasa	Hasna	17 thn	13 thn	SMP	SD	28-5-2006	Dusun Benteng

Sumber : Data catatan perkawinan di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang, Tahun
2006-2010

Dari data diatas menunjukkan tingkat perkawinan di bawah umur di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba pada tahun 2006–2010 ada 14 kasus.

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di masyarakat desa Tanah Towa kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba merupakan problematika karena apabila seorang anak tidak melanjutkan pendidikan maka, akan terjadi perkawinan di bawah umur dan merupakan kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, ada rasa takut dan khawatir pada diri orang tua, anaknya akan terjerumus kejurang maksiat atau melakukan tindakan yang melanggar adat seperti : *kawin silariang* (gadis dan pemuda bersepakat untuk melarikan diri bersama-sama setelah itu melakukan perkawinan), *kawin nilariang* (perkawinan yang terjadi setelah laki-laki melarikan seorang perempuan), *kawin erangkale* (perkawinan yang dilangsungkan setelah gadis membawa dirinya sendiri kepada laki-laki), dan *nipakateanang* (seorang wanita yang hamil diluar nikah).

Pelanggaran adat yang sangat mengganggu keseimbangan masyarakat sehingga perkawinan dibawah umur dianggap suatu jalan terbaik walaupun anak itu belum mampu baik secara materi maupun immaterial (psikologis).¹

Kenyataan bahwa perkawinan di bawah umur bukan hanya merupakan kisah lama yang terjadi, peninggalan masa lalu yang dalam setiap waktu masih ada dan terjadi, walaupun dalam bentuk dan cara yang berbeda, seperti halnya yang terjadi di desa Tanah Towa rendahnya usia perkawinan di desa ini lebih merupakan tradisi lama yang masih berkembang di masyarakat, sehingga sulit untuk dihilangkan.

¹ Wawancara dengan bapak Sultan selaku Kepala Desa Tanah Towa, Senin tanggal 09 Mei 2011.

Secara sosiologis struktur masyarakat desa lebih merupakan keluarga luas, yang hal ini sangat mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat dalam membentuk sebuah keluarga yang merupakan awal mula terbentuknya masyarakat.²

Sistem kekerabatan pada suku Kajang/ Konjo umumnya berkembang dari suatu keluarga inti. Begitu pula halnya pada masyarakat Tanah Towa yang anggota-anggotanya terdiri atas seorang ayah, ibu dan anak-anaknya yang hidup dalam sebuah rumah tangga. Sedangkan keluarga luas adalah orang-orang atau para kerabat yang dipertalikan dengan hubungan darah, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.

Masyarakat Desa Tanah Towa memperhitungkan garis keturunannya berdasarkan prinsip parental (bilateral) yakni hubungan yang memperhitungkan garis keturunan ayah maupun ibu.

Adapun kekerabatan dari semua pihak baik pihak ayah maupun pihak ibu tetap dijaga agar unsur musyawarah, tolong menolong, dan kesayangan serta keharmonisan tetap terpelihara diantara mereka. Konsep itu juga memberi pengaruh dalam pemilihan jodoh. Hal itu terjadi untuk menjaga kelanjutan rumah tangga dan hubungan kekerabatan perkawinan dan kekerabatan yang tumbuh atas dasar *sibija* (mempunyai hubungan keluarga).

Dalam hal perkawinan, masyarakat adat Tanah Towa terikat dengan adat yang mengharuskan menikah dengan sesama orang dalam kawasan adat. Jika tidak maka mereka harus hidup di luar kawasan adat, pengecualian bagi pasangan yang bersedia mengikuti segala aturan dan adat-istiadat yang berlaku di kawasan adat.

² Wawancara dengan Bapak Sultan Selaku Kepala Desa Tanah Towa, senin tanggal 09 Mei 2011

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa suku Kajang, di dalamnya juga mengatur tata cara dan prosedur pelaksanaan perkawinan, termasuk perkawinan dibawah umur atau biasa disebut perkawinan anak-anak menurut adat.

Dalam upacara perkawinan adat Kajang khususnya di Tanah Towa itu terdiri atas beberapa tahap kegiatan yang meliputi:

1. *Abboja'* (pencarian)

Setelah salah satu keluarga berencana untuk mencari pendamping hidup untuk anaknya maka ada dua cara yang dilalui yaitu mencari keluarga sendiri atau calon di luar keluarga.

Pencarian (*abboja'*) dari pihak laki-laki kepada calon gadis yang akan dilamar tetap mengutamakan nilai-nilai agama dan budaya setempat. Demikian halnya seorang gadis yang dilamar oleh laki-laki akan selalu memilih atau meneliti laki-laki yang akan melamarnya.

Dalam menentukan siapa gadis yang akan dilamar, keluarga laki-laki merembukkan dalam keluarganya. Memilih jodoh dari keluarga pihak ayah atau pihak ibu, dan di dalam perembukan itu biasanya keluarga laki-laki akan memilih diantara beberapa alternatif, dengan alasan bahwa apabila si gadis itu tidak mau, maka dia akan melamar wanita yang lainnya. Memilih jodoh berdasarkan keturunan, kecantikan, budi pekerti dan kekayaan. Selain itu laki-laki berkeinginan atau mengidam-idamkan calon isteri yang dapat bekerja sama, baik dalam hal kerjasama menyangkut material maupun menyangkut kerjasama dalam bidang spiritual.³

³ Wawancara dengan Puang Sampe selaku tokoh Masyarakat, Tanggal 13 Mei 2011.

2. *Ak'jangan-jangan* (siraturahmi)

Setelah disepakati wanita mana yang akan dilamar, pihak keluarga laki-laki itu mengadakan kegiatan *ak'jangan-jangan* (siraturahmi). Caranya adalah mengirim utusan kepada pihak keluarga perempuan. Utusan ini biasa dari laki-laki atau perempuan yang dianggap ada hubungan darah antara pihak laki-laki dan perempuan, yang mana utusan tersebut merupakan penghubung akan bisa tidaknya dia datang untuk melamar gadis pihak keluarga perempuan.

Pengiriman utusan ini dilakukan secara diam-diam agar tidak diketahui oleh masyarakat (masih sangat rahasia) karena keluarga laki-laki merasa malu kalau tidak ada peluang untuk datang melamar.

Pihak utusan dalam menyampaikan maksudnya disampaikan dalam bentuk bahasa tubuh atau bahasa kiasan. Pertemuan ini belum begitu resmi, akan tetapi dalam pertemuan itu akan diketahui bisa atau tidaknya laki-laki datang melamar.

Kata-kata kiasan itu banyak macamnya, salah satunya seperti utusan laki-laki berkata: *anreja burukne ki bolai ri ballatta inni salain nakke?* (apa tidak ada laki-laki yang pernah datang kerumah ini selain kami). Orang tua perempuan: *main rie', tungkuta'nang tapi tala' ni tarima karena kapan'i anre siuppa bicara* (ada pernah yang bertanya tapi tidak diterima karena barangkali kurang berkenan). Kalau seperti itu jawabannya berarti pihak perempuan bersedia atau terbuka jalan.

Namun, apabila dalam sindiran-sindiran yang dikemukakan oleh utusan laki-laki tidak ditanggapi, atau ada kata-kata *rie'mo tau maeng rie'* (sudah ada orang yang) berarti tidak terima.

Berselang beberapa hari kemudian setelah ada tanda-tanda dari orang tua wanita, maka pihak wanita yang menerima kedatangan utusan tadi datang ke rumah

pria dan menyampaikan kepada orang yang menjadi utusan pihak pria tadi, bahwa maksudnya ada harapan untuk berhasil dan sebaiknya maksud tersebut dilanjutkan saja. Bila berita itu belum dapat mengambil suatu kesimpulan secara tergesa-gesa dan berusaha mengirimkan lagi seorang utusan secara diam-diam. Setelah merasa yakin bahwa usaha itu ada harapan dari pihak perempuan maka langkah selanjutnya adalah mengutus beberapa orang yang dianggap mampu.⁴

3. *Lampa duta* (meminang)

Setelah utusan tadi memberikan sinyal kepada pihak laki-laki bahwa jalanan bersih, langkah selanjutnya adalah orang tua pihak laki-laki mengutus keluarga seperti orang yang dituakan, saudara-saudara, pihak-pihak keluarga yang terdekat.

Selanjutnya detik-detik yang mendebarakan dan penuh ketegangan antara kedua belah pihak. Peminangan telah dihadiri banyak keluarga, dan disaat itulah akan diketahui diterima atau tidaknya lamaran. Prosesi ini, pihak laki-laki akan menunjuk satu orang juru bicara yang mewakilinya, demikian halnya dengan pihak wanita akan menunjuk satu orang yang dituakan untuk mewakilinya bila keluarga laki-laki telah datang. Dalam acara ini biasanya membicarakan *doi panai* (uang belanja), *sungrang* (mahar), *tedong* (kerbau), *sassing* (hewan yang akan dibawa), dan *allo anjarina pabuntingang* (tanggal jadi perkawinan). Demikian seterusnya, sampai ada kesepakatan atau diterima lamaran tersebut.

Sebagai informasi, setelah selesainya meminang, berarti wanita secara resmi telah dilamar. Menurut adat kebiasaan orang Kajang seorang gadis yang secara resmi telah dilamar oleh seorang laki-laki, gadis tersebut harus dipingit di rumahnya. Hal

⁴ Wawancara dengan Puang Sampe selaku Tokoh Masyarakat, Tanggal 13 Mei 2011.

ini dimaksudkan agar si gadis tidak lagi terpengaruh oleh dunia luar, terutama yang bisa mempengaruhi niat untuk melangsungkan perkawinan tersebut atau dikhawatirkan terpengaruh hal yang negative.

4. *Ajjaga leko*

Secara harfiah “*ajjaga*” artinya berpesta, sedangkan “*leko*” artinya daun sirih. Menurut istilah adalah malam pacar, yang di daerah Makassar dikenal dengan “*rontigi*” (Bugis:Mappacing), yaitu suatu rangkaian upacara perkawinan adat yang berlangsung sehari sebelum mempelai laki-laki datang ke tempat mempelai waniata untuk melangsungkan pernikahan.

Ajjaga leko ini terbagi atas beberapa fase, yaitu :

- *Abba'ra'* artinya berbedak, pada acara ini berkumpul keluarga dekat dan para sahabat memberikan doa restu kepada calon mempelai dengan menyuguhkan daun sirih yang sudah di bentuk sedemikian rupa yang disertai dengan ikatan daun dan daun sirih merah dan tiga buah piring kecil berisi tepung budak (kapur) yang berwarna putih, kuning dan satu beras dan dua piring. Setiap keluarga yang kena giliran, *abba'ra'* memercikkan air yang terdapat dalam mangkok tersebut dengan ikatan daun dan daun sirih merah dinamakan dengan *andingngi* (memberikan kesejukan).
- *Kelong jaga*, artinya nyanyian pesta adat, nyanyain pesta ini diiringi dengan pukulan dua buah gendang. Nyanyian ini dimulai apabila toa kampung atau orang yang dituakan dikampung menghadap ke depan para pemangku adat, bahwa nyanyian pesta akan segera dimulai. Nyanyian itu pula dilakukan dilakukan di depan para pemangku adat dan diikuti oleh orang-orang yang paham akan nyanyian tersebut. Hal ini berlangsung sekitar sepuluh menit.

- *Ang'ngada'* berasal dari kata '*ada*' yang ditambahkan dengan awalan, '*ang*' sebagai pelengkap atau penguat, artinya *amang'ada'*. Maksudnya menggelar makanan dan minuman di depan para pemangku adat diatas *jali* dan *tappere lonjo* (tikar yang berlapis dua yang terbuat dari daun lontara). Kemudian pembicaraan ini beralih kepada laki-laki dan saling berkunjung dengan omongan yang lemah lembut dan serius pula tentang mahar.

5. *Angngatta' sunrang*

Angngatta artinya menetapkan atau menghitung dan *sunrang* berarti mahar. Jadi, *angngatta sunrang* adalah menetapkan atau menghitung mahar yang akan dibawa ketempat mempelai wanita pada upacara perkawinan. Menghitung mahar dilakukan oleh duta atau yang dipercayakan sebagai utusan untuk membawa mahar tersebut ke tempat mempelai wanita.

Untuk menghitung mahar tersebut, utusan menghadap kepada *galla' puto* yang disaksikan oleh para pemangku adat yang lain. Kemudian "*suro*" berkata : "*permisi puang galla*, Kami mengadakan pesta seperti ini bukan karena kami mampu atau karena kami sombong, hanya karena adanya cinta dan kasih sayang, sehingga terjadi peminangan yang pada awalnya didahului dengan saling berkunjung antara laki-laki dan perempuan dengan pembicaraan yang lemah lembut dan serius. Kemudian menentukan hari perkawinan dengan mahar yang kami sandarkan kepada *galla puto'* sampai kepada Ammatoa.

Hal ini langsung disambut oleh *galla puto'* dan mengulangi ucapan "*suro'* di atas dan berkata: "kalau demikian adanya, berarti ini adalah perkawinan atau pernikahan *suro* langsung menyahutinya": "pernikahan itu nanti besok di tempat mempelai wanita". Kalau demikian, kata *gallo puto*, lapangkanlah (*Pattanetei*) mahar

tersebut supaya kita menyaksikan dan menghitung bersama, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menghitung mahar nantinya, maka dihitunglah mahar tersebut secara seksama.

Setelah acara “*angngatta sunrang*” selesai, dilanjutkan dengan acara makan bersama, yang mengakhiri pesta “*ajjaga leko*” tersebut.

6. *Ajjaga roa*’

Ajjaga roa, terdiri atau dua kata, *ajjaga* berarti berpesta, sedangkan ‘*roa*’ berarti ramai. Maksudnya adalah dari sekian banyaknya tahapan dalam pelaksanaan pesat perkawinan, pada acara inilah sebagai inti dari pada upacara pesta perkawinan. Sebab pada malam tersebut pernikahan dilangsungkan.

Ajjaga roa’ dilaksanakan oleh kedua belah pihak, namun dalam hal pelaksanaan sedikit ada perbedaan, yaitu pesta pihak mempelai laki-laki dilangsungkan lebih dahulu sekitar pukul 18.30. wita. sampai pukul 20.30. wita di tempat kediaman mempelai laki-laki, inti dari pesta ini selain menjamu para tamu, juga diadakan acara *mengadat*, yaitu menyuguhkan makanan dan minuman kepada para pemangku adat secara adat. Selain itu pula *ajjaga roa* dilangsungkan di tempat kediaman mempelai wanita sekitar pukul 22.00 wita sampai upacara pernikahan dinyatakan rampung.

Setelah acara ‘*ajjaga roa*’ di tempat mempelai laki-laki, barulah mempelai wanita yang didahului dengan beberapa utusan, yaitu ‘*suro*’ berangkat lebih dahulu membawa mahar yang telah ditetapkan pada malam ‘*ajjaga leko*’ ke rumah mempelai wanita, ketika *suro* tiba di rumah mempelai wanita, maka acara ‘*angngatta sunrang*’ segera di mulai yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang telah berbicara sebelumnya dan disaksikan oleh para pemangku adat. Kemudian dihitunglah mahar

tersebut oleh “*galla puto*” setelah menghitung mahar, dilanjutkan dengan acara makan malam bersama yang didahului dengan membaca doa oleh imam desa.

Sekitar pukul 22.00 wita, datanglah keluarga mempelai laki-laki dengan membawa “baku puli” atau dua buah bakul lagi berisi “*songkolo*” atau beras ketan kukus. Kemudian disusul oleh utusan yang ketiga, yaitu ‘*sepupu*’ dengan membawa “*tindrolo nikka*’ atau satu bakul berisikan ‘*dumpi eja*’ atau kue merah yang terbuat dari beras ketan, ‘*songkolo*’ serta ‘*kampalo*’ atau beras ketan yang dibungkus dua kelapa muda dan dikukus dan ‘*papakatto*’ atau bakul beras yang berisi *songkolo*, *dumpi eja*, *ruhu-ruhu*, serta *kampalo*.

Diperkirakan para utusan telah tiba di tempat mempelai wanita, barulah mempelai terdekat, *nitarangka*’ atau berkemas oleh ibunya atau seorang perempuan keluarga terdekat, yang sebelumnya didahului dengan “*angnganre bunting*’ atau makan pengantin, yaitu adalah ibunya mengambil kerak nasi dan gula merah serta garam diaduk dalam satu tempat, lalu disuapi oleh ibunya disusul oleh saudara-saudaranya. Kemudian dinasehati yang berbunyi : sebaiknya kamu malu untuk kembali dan janganlah selalu berselisih paham.

Setelah “*nipatarangka*’, maka berangkatlah mempelai laki-laki bersama rombongan yang dipandu oleh ‘*andorong bunting*’ tanpa ditemani oleh kedua orang tuanya. Ketika mempelai laki-laki telah tiba di tempat mempelai wanita, maka ia dijemput oleh ‘*pallaha tuka*’ yang berarti penghalang tangga, yaitu beberapa ‘*passappi*’ yang menghalangi mempelai laki-laki dan rombongan di depan tangga, mempelai laki-laki dan rombongan dibolehkan naik ke dalam rumah, apabila ‘*passappi*’na’ tersebut diberi uang sejumlah Rp. 30.000,- Rp. 50.000, oleh mempelai laki-laki.

Setelah mempelai laki-laki dan rombongan diperbolehkan naik, kemudian ditaburi beras oleh keluarga mempelai wanita sebagai pertanda selamat datang. Ketika pengantin telah masuk di rumah, maka ia langsung diantar untuk '*abbua*' kepada '*androng bunting*' mempelai wanita, kemudian dinikahkan oleh pak imam tetapi jika perkawinan anak-anak maka tidak akan dinikahkan oleh pak imam atau selaku penghulu selama batas yang telah ditentukan. Terjadi pernikahan atau akad nikah jika, perempuan telah mengalami menstruasi atau haid (akil balig) oleh pak Imam atau penghulu dan laki-laki telah mengalami mimpi basah. pihak laki selanjutnya '*assaling*' kemudian '*nideppo*' dan terakhir adalah '*abbua*' kemudian berkenalan dengan keluarga sang istri. Selain itu pula ia memohon di doakan.⁵

7. *Mange basa*

Apabila acara '*ajjaga roa*' telah selesai di rumah mempelai wanita, maka datanglah keluarga mempelai laki-laki untuk menyampaikan panggilan kepada mempelai wanita untuk diajak ke rumah mempelai laki-laki. Hal ini disebut dengan '*mange basa*', yang dikenal di daerah Makassar dengan istilah '*alleka*' *bunting*' sedang di tanah Bugis disebut dengan '*marola*' yaitu mempelai wanita datang untuk diantar ke rumah suaminya atau ke rumah mertuanya setelah acara penting dalam kaitan pernikahan selesai.

Ketika pengantin wanita telah masuk ke dalam rumah maka di lanjutkan dengan acara "*pakanre bunting*" atau memberikan makanan kepada pengantin wanita dilanjutkan kepada keluarga yang masih ada di tempat itu. apabila acara itu selesai, maka datanglah keluarga pengantin laki-laki bersalaman kepada pengantin wanita dan

⁵ Wawancara dengan Puto Lateng selaku tokoh Adat, Tanggal 15 Mei 2011.

memberi semacam hadiah untuk kebutuhan rumah tangga, seperti periuk, wajan, dan lain-lain. Acara ini disebut '*assolo*' yang dikenal di daerah Makassar dengan istilah '*angngeori*'.

Saat acara tersebut di atas telah usai, maka pengantin wanita kembali ke rumahnya yang disertai dengan pemberian orang tua mempelai laki-laki berupa padi, jagung dan lain-lainnya serta hadiah keluarga pada acara '*assolo*' di atas. Seluruh rangkaian acara perkawinan secara adat di atas berakhir pada dini hari.⁶

Oleh karena hukum adat Kajang, mengenal Pasang (pesan) artinya lisan dan tidak tertulis yang juga adalah ajaran leluhur mereka. Isi pasangan ri Kajang (pesan adat Kajang), yaitu:

1. tangurangi mange ri turiea arana, yang berarti senantiasa ingat pada Tuhan Yang Berkehendak.
2. alemo sibatang, abulo sipappa, tallang sipahua, manyu siparampe, sipakatau tang sipakasiri, yang artinya memupuk persatuan dan kesatuan dengan penuh kekeluargaan dan saling memuliakan.
3. lambusu kigattang sabara ki pesona, yang artinya bertindak tegas tetapi juga sabar dan tawakkal.
4. Sallu riajoka, ammulu riadahang ammaca ere anreppe batu, alla buirurung, allabatu cideng, yang artinya harus taat pada aturan yang telah dibuat secara bersama-sama kendati harus menahan gelombang dan memecahkan batu gunung
5. Nan digaukang sikontu passuroangto mabuttayya, yang artinya melaksanakan segala aturan secara murni dan konsekuen.⁷

Kelima ajaran inilah yang menjadi pedoman masyarakat dan para pemimpin dalam kehidupan sehari-hari. Dari kelima pesan ini lahir prinsip hidup sederhana dan saling menyayangi diantara mereka.

Menurut hukum perkawinan adat Kajang, setiap pelaksanaan perkawinan harus mendapat restu dari pemangku adat/aparat desa. Cara memperoleh restu dari

⁶ Wawancara dengan Puang Halim selaku tokoh Masyarakat, Tanggal 16 Mei 2011.

⁷ Wawancara dengan Puang Bontong selaku Kepala Dusun Jannaya, hari Rabu tanggal 11 Mei 2011.

pemangku adat/aparat desa, yakni salah seorang anggota keluarga calon mempelai menyampaikan maksudnya bahwa telah diizinkan kedua mempelai oleh kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan. Materi yang disampaikan berkisar pada nama dan identitas calon mempelai, *jujuran* (uang belanja), rencana waktu pelaksanaan, penghulu (Imam/ Pembantu Pejabat Pencatat Nikah) setempat yang akan menikahkan.

Masalah perkawinan di bawah umur menurut hukum adat di desa Tanah Towa Kecamatan Kajang membolehkan perkawinan di bawah umur dimana anak laki-laki kurang dari 19 tahun dan perempuan kurang dari 16 tahun. Dalam hal ini, mereka dipersatukan oleh kedua orang tua mereka dengan symbol melaksanakan “*ajjara roa*” (pesta ramai / walimatul ursy). Dengan kata lain, hidup kedua mempelai ditangguhkan sampai mencapai usia yang telah ditentukan atau yang disebut kawin gantung. Dalam artian, kedua pasangan ini belum dapat bercampur sebagaimana layaknya suami isteri.⁸ Setelah kedua pasangan tersebut mencapai usia yang telah ditentukan maka atau perempuan tersebut baligh barulah diadakan pernikahan secara sah sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan.

Perkawinan adat Kajang adalah sah mengikat, apabila pada saat pelaksanaan dihadiri oleh Pemangku adat. Sedang kehadiran Pemangku adat tersebut, tidaklah berkedudukan sebagai saksi akad nikah (saksi nikah). Oleh karena yang dimaksud saksi nikah menurut Kompilasi Hukum Islam, yakni terdiri dari dua orang, biasanya diambil dari wakil mempelai laki-laki dan wakil mempelai wanita.

⁸ Wawancara dengan Puang Hatong selaku penghulu (Imam/ Pembantu Pejabat Pencatat Nikah desa Tanah Toa), hari Selasa tanggal 10 Mei 2011.

Bahwa memang ada pemahaman di kalangan sebagian besar anggota masyarakat setempat, yang lebih mengutamakan keabsahan perkawinannya menurut adat daripada keabsahan perkawinannya menurut agama dan peraturan perundang-undangan.⁹

Perkawinan di bawah umur biasanya dilaksanakan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum cukup umur (usia minimal yang disyaratkan), yakni calon mempelai pria belum berusia 19 tahun dan/atau calon mempelai wanita belum berusia 16 tahun. Di samping itu, calon mempelai biasanya dari kalangan petani dan memang tidak ada niat atau maksud menjadi Pegawai Negeri Sipil yang memerlukan buku atau akta nikah. Sehingga kedudukan buku nikah atau akta nikah sebagai alat bukti otentik telah terjadinya perkawinan tidak terlalu diperlukan, tetapi yang terpenting perkawinannya dihadiri oleh Pemangku adat dan diakui keabsahan perkawinannya oleh adat.¹⁰

Adapun Sebagian masyarakat Kecamatan Kajang cara yang ditempuh oleh masyarakat dalam mensiasati perkawinan di bawah umur dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, dan yang kedua dengan melakukan pemalsuan umur yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka sendiri. Tetapi yang melakukan dispensasi lebih kecil ketimbang yang melakukan pemalsuan umur. Alasan orang tua yang tidak meminta dispensasi di Pengadilan Agama karena mereka takut bila tidak diberikan izin oleh Aparat Desa tidak akan menerima atau menolak terjadi perkawinan di bawah umur.

⁹ Wawancara dengan Puang Syamsuddin selaku tokoh masyarakat, hari Selasa tanggal 10 Mei 2011

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Amiruddin, selaku mantan Kepala KUA Kecamatan Kajang, hari Kamis 12 Mei 2011.

Yang menjadi tolak ukur masyarakat Desa Tanah Towa dalam menentukan kedewasaan seorang anak adalah dari segi fisiknya.

Disamping itu, pelaksanaan perkawinan di bawah umur tersebut adalah karena pada umumnya masyarakat tidak mengetahui secara pasti tentang aturan-aturan batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan No. 1/1997 oleh pihak yang berwenang sehingga masyarakat menganggap bahwa perkawinan yang mereka lakukan bukanlah termasuk perkawinan di bawah umur, akan tetapi merupakan perkawinan normal yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan Islam, karena memang Islam menentukan secara pasti batasan usia perkawinan seperti yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974.

Dan pada umumnya masyarakat menganggap bahwa pendidikan anaknya hanya cukup maksimal tingkat Sekolah Dasar (SD). Jika diteliti ada dua penyebab, yaitu pertama karena orang tua kurang mampu dalam ekonomi, dan yang kedua karena orang tua ingin memining cucu dan ada perasaan takut anaknya dikatakan tidak laku dan perawan tua.

Dari data yang didapat, kebanyakan perkawinan di bawah umur dilakukan oleh kaum wanita daripada laki-laki. Hal ini karena umumnya masyarakat menganggap bahwa perempuan hanya sebagai pelayan seorang laki-laki setelah menikah walaupun pendidikan tinggi namun pada akhirnya ia akan kembali ke dapur dan tinggal dirumah, agar terhindar dari fitrah. Dan posisi wanita dalam sebuah rumah tangga harus berbakti dan patuh pada laki-laki.

C. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan di bawah Umur

Seperti yang telah diuraikan diatas, maka secara ekspilisit faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur tersebut antara lain :

1. Faktor perkawinan atas kehendak orang tua

Di masyarakat Desa Tanah Towa pada umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya.

Umur seseorang tidaklah suatu jaminan untuk mencapai suatu kebahagiaan yang penting anak itu sudah aqil (baligh), aqil (baligh) bagi masyarakat desa ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun umurnya, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah.

Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya, lebih-lebih orang tua dari pihak perempuan. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin untuk menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil. Dan kebanyakan di masyarakat Desa Tanah Towa anak-anaknya yang masih usia muda sudah dijodohkan.

Karena dalam perjodohan ini orang tua berperan lebih aktif, sehingga memberi kesan seakan-akan mencari jodoh untuk anaknya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua. Sehingga banyak kasus bila anak tersebut sudah dewasa, maka mereka akan menentukan sikap dan pilihannya sendiri dengan cara memberontak dan lari.

Akan tetapi, orang tua dengan berbagai cara mempertahankan ikatan perjodohan yang sudah lama mereka bina selama bertahun-tahun untuk sampai

kepelaminan. Dan para orang tua yang egois dalam mempertahankan ikatan perijodohan itu mengambil jalan menyumpahi anak dan mengklaim anaknya sebagai anak yang tidak berbakti kepada orang tua dan durhaka. Sehingga anak dengan terpaksa menerima perijodohan tersebut, dan anak tersebut akhirnya putus sekolah karena orang tua segera mengawinkannya untuk menjaga segera kemungkinan yang buruk akan terjadi.¹¹

2. Kemauan anak

Di masyarakat Desa Tanah Towa, perkawinan di bawah umur sangat populer dan banyak terjadi. Banyak anak yang melakukan perkawinan di bawah umur adalah atas kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan dan dorongan orang tua, kenyataan itu disebabkan Karena pengaruh lingkungan yang sangat rendah dengan kejiwaan anak, sehingga anak tidak mampu untuk menghindarinya.¹²

Kenyataan ini yang membuktikan bahwa umumnya masyarakat Desa Tanah Towa sebelum melakukan perkawinan mereka terlebih dahulu sudah mengenal satu sama lain sehingga dalam hal ini tidak ada paksaan dari orang tua. Dan bagi anak yang belum dijodohkan merasa terkucilkan dan kurang dihargai oleh masyarakat, karena tidak seperti yang lainnya. Disini, peran orang tua hanya bersifat pasif, mereka hanya mengikuti apa yang menjadi pilihan anaknya.

¹¹ Wawancara dengan Baho' selaku pelaku perkawinan di bawah umur yang dijodohkan, bertempat tinggal di Dusun Balagana, tanggal 13 Mei 2011.

¹² Wawancara dengan Palasa selaku pelaku perkawinan di bawah umur yang dijodohkan, bertempat tinggal di Dusun Benteng, tanggal 13 Mei 2011.

3. Pengaruh adat dan budaya

Di Desa Tanah Towa, perkawinan di bawah umur sudah menjadi tradisi turun temurun dan sudah menjadi kebanggaan orang tua jika anak-anaknya cepat mendapatkan jodoh, agar dapat di hargai oleh masyarakat.

Suatu kebiasaan yang sudah sejak dahulu dan dipandang kolot pada zaman modern, masih tumbuh dan berkembang di masyarakat, contohnya anggapan bahwa anak yang sudah baligh yang belum menikah atau belum mendapat jodoh, dianggap tidak laku atau dianggap sebagai perawan tua.

Karena anggapan itulah yang sudah mengakar dalam masyarakat di Desa Tanah Towa. Dan dikarenakan malu pada masyarakat jika mempunyai anak yang lama mendapatkan jodoh. Sehingga, untuk menutupi rasa malu itu maka orang tua menempuh dua jalan.

Pertama menggunakan hak ijbarnya ; kedua dengan caraa memotivasi kepada anaknya untuk segera mencari jodohnya agar anaknya segera menikah.¹³

4. Pengaruh rendahnya pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu system adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Desa Tanah Towa.

Berdasarkan penelitian tersebut, salah satu faktornya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Dan kenyataan inilah yang banyak terjadi di Desa Tanah Towa yang melakukan perkawinan di bawah umur karena rendahnya tingkat pendidikan bila dilihat dari perkembangan zaman.

¹³ Wawancara dengan Puang Hading selaku Kepala Dusun Benteng, tanggal 14 Mei 2011.

5. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadikan manusia bahagia, walaupun bukan salah satunya. Tetapi ekonomi dapat menentukan kedudukan dan kebahagiaan di dunia.

Jika dikaitkan dengan praktek perkawinan di bawah umur, penulis mendapati bahwa faktor ekonomi merupakan alasan pokok bagi orang tua dalam menikahkan anaknya. Tujuan dari orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar mereka segera bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua, karena pada kenyataannya mereka sudah berumah tangga perekonomiannya masih tergantung pada orang tuanya.¹⁴ Tetapi ada juga sebagian orang tua yang menikahkan anaknya dengan tujuan agar anaknya berfikir secara dewasa. Dewasa disini artinya agar dia bisa berfikir tentang tanggung jawab dan tidak selalu menggantungkan kepada orang tua.¹⁵ Walaupun demikian, tidak sesuai kenyataan yang ada. Ada juga yang beranggapan bahwa dengan cepatnya menikahkan anaknya, juga dapat menambah keluarga dan bertambahnya keluarga maka rejeki juga bertambah.

6. Faktor Agama

Faktor agama merupakan salah satu penyebab dari perkawinan di bawah umur, karena mereka hanya tahu sebatasnya saja, tanpa harus mengkaji lebih dalam agama tersebut.

¹⁴ Wawancara dengan Puang Sutong selaku orang tua dari pelaku perkawinan di bawah umur di Dusun Benteng, tanggal 13 Mei 2011.

¹⁵ Wawancara dengan Puang Sampe selaku orang tua dari pelaku perkawinan di bawah umur di Dusun Balagana, tanggal 13 Mei 2011.

Dari keterbatasan itulah orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, karena mereka takut anaknya-anaknya akan terjerumus dalam perbuatan maksiat tanpa mereka memikirkan akibat setelah perkawinan.

Melihat perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi sehingga masyarakat desapun sudah tak asing dengan alat komunikasi atau biasa disebut Hp dan Televisi dengan acara-acara yang dapat merusak pikiran anak muda.

Terbukti di masyarakat desa banyak anak-anak yang terjerumus ke dalamnya, mulai berhubungan dengan minuman-minuman keras dan kawin lari, sehingga orang tua khawatir merusak agama dan akhlak anak-anaknya, maka mereka mengambil jalan secepat untuk segera mencari jodoh anaknya dan segera menikahnya agar mereka tidak terjerumus dan dapat berfikir secara dewasa juga bertanggung jawab dalam rumah tangga.

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT MENGENAI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadikan kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT., telah menciptakan makhluknya-Nya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad SAW., juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan begitu penting dan harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW.¹

Dan pengertian perkawinan itu sendiri dapat dilihat dari segi bahasa dan istilah. Secara bahasa kawin atau nikah dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (النكح) dan zawaj (زوج).² Kata *na-ka-ha* terdapat dalam al-Quran dengan arti kawin seperti pada Q.S. An-Nisaa' / 4: 3.

¹ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* (Jakarta:Kencana Mas,1990), h.3.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Mas, 2003), h. 73.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ
وَرُبَّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ³ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³

Kata *za-wa-ja* dalam al-Quran dalam arti kawin, seperti pada Q. S. Al-Ahzab

/ 33: 37 :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ
فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا
وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيِّ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا
مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika kamu Berkata kepada orang yang Allah Telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) Telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu Telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.⁴

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: CV. Swakarya, 1990), h. 115.

⁴ *Ibid.*, h. 673-674.

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم) , “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد). Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqh banyak diartikan dengan: nikah, artinya akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz nakaha dan zawaja.⁵

Sedangkan dalam Kamus Besar Indonesia kawin mempunyai arti hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri secara resmi.⁶

Ada juga arti perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁷ Jadi apabila antara laki-laki dan perempuan yang sudah siap untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaklah perempuan harus melakukan akad nikah terlebih dahulu. Dalam al-Quran perkawinan disebut dengan nikah dan *mistaq* (perjanjian).

Ada juga beberapa definisi kawin yang dikemukakan oleh fuqaha, namun pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti karena semuanya mengarah kepada makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan. Kawin pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita untuk penikmatan sebagai tujuan primer.⁸

Bagi ulama Hanafiyah akad nikah membawa konsekuensi bahwa seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk

⁵ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h.74.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 614.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2008), h. 8.

⁸ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukdja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang & Hukum Perdata/BW* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), h. 13.

mendapatkan kesenangan atau kepuasan, dari ulama Malikayah, menyebutkan bahwa suatu akad mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga, dari ulama Syafi'iyah akad membawa akibat suami memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya, sedangkan ulama Hanabilah memandang bahawa akad dengan menggunakan lafal *inkah* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan atau sebaliknya.⁹

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَاحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه).

Artinya:

Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng (Muttafaq 'alaih).

الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالبكر تستأمر واذنها سكوتها. رواه مسلم

Artinya:

Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan kepada gadis (perawan) dimintai persetujuannya, dan persetujuannya jika dimintai, (gadis itu) diam (Riwayat Muslim).

Kemudian dalam rumusan Pasal UU. Nomor 1 Tahun 1974 termuat pengertian normatif, bahwa; Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa; Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

⁹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h.10-11.

miitsaaqan gholiidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Sedangkan di dalam hukum adat yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam perikehidupan masyarakat kita, sebab masalah perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga kedua belah pihak saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.¹¹

Adapun syarat sahnya perkawinan itu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maupun hukum Islam. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing sedang hukum perkawinan Islam yang dijadikan pedoman sah dan tidaknya perkawinan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum agama Islam. Dalam hal ini, hukum Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan. Rukun merupakan sebagian hakikat perkawinan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka perkawinan tidak akan terjadi.¹²

Rukun perkawinan tersebut antara lain :

- a. Adanya kedua mempelai
- b. Adanya Wali dari pihak calon mempelai wanita
- c. Adanya dua orang saksi

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, h. 69.

¹¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 221.

¹² Ahmad Ichan, *Hukum Perkawinan bagi yang beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Paradia Paramita, 1986), h.31.

d. Adanya shighot akad nikah atau ijab qabul

e. Mahar atau Mas kawin.¹³

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang menghalalkan hubungan suami-isteri. Agar perkawinan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari norma hukum yang berlaku, sedapat mungkin dipahami syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab II mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut norma hukum yang termuat dalam Pasal 6 UU. Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan harus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁴

¹³ Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga: Perspektif Al-Quran Dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, (Tangerang: Elsas, 2010), h. 30-31.

¹⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan & UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 4-5.

Syarat persetujuan yang diatur Pasal 6 UU. Nomor 1 Tahun 1974, bertujuan menghindari terjadinya kawin paksa guna mewujudkan kesukarelaan. Sehingga perkawinan yang dilangsungkan, benar-benar didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak calon mempelai. Perkawinan yang didasarkan atas persetujuan dimaksud, merupakan aplikasi dan implementasi dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kemudian di dalam rumusan Pasal 7 UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹⁵

Sebenarnya norma hukum tentang pembatasan usia perkawinan (Pasal 7 UU. Nomor 1 Tahun 1974) tidak berkaitan secara langsung dengan kedewasaan, tetapi berorientasi pada pemenuhan syarat administratif. Kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur melalui tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti yang bersangkutan sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.¹⁶

Bagi seseorang pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dapat melangsungkan perkawinan apabila memperoleh izin dari kedua orang tua. Namun apabila usia calon

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 53-54.

mempelai sudah melewati batas usia maksimal yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU. Nomor 1 Tahun 1974, secara *ex officio* tidak memerlukan lagi izin kedua orang tua.

Terhadap perkawinan dibawah umur menurut Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 UU. Nomor 1 Tahun 1974, berlaku syarat tambahan yakni harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan (Agama) atau pejabat lain berwenang. Betapa berat dan berbelit-belitnya persyaratan perkawinan dimaksud, menjadi salah satu faktor pendorong seseorang melakukan perkawinan dibawah umur mengakibatkan juga perkawinan dibawah umur dengan suatu harapan bahwa yang penting dapat tercapai tujuan perkawinan.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan berorientasi pada terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU. Nomor 1 Tahun 1974). Sedang menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.

Tujuan perkawinan menurut hukum Adat adalah merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan. Disamping itu, ada kalanya suatu perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak, ia merupakan saran pendekatan dan perdamaian antar kerabat dan begitu pula dengan perkawinan itu bersangkut paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan.¹⁷

¹⁷ Tolib Setiady, *Op. cit.*, h.222.

Tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata-mata kesenangan lahiriah melainkan membentuk suatu lembaga, dimana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri, kesehatan dan perbuatan tak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia, serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlakukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.¹⁸

Mengenai fungsi dan tujuan perkawinan dalam Islam, dapat diperinci sebagai berikut:

- a) Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan biologis dan seksual yang sah dan benar.
- b) Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
- c) Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
- d) Menduduki fungsi sosial.
- e) Mendekatkan hubungan antara keluarga dan solidaritas kelompok.
- f) Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
- g) Merupakan suatu bentuk ibadah, yakni pengabdian kepada Allah dan mengikuti Rasul Saw.¹⁹

Betapa suci dan mulianya tujuan perkawinan tersebut, sehingga Pemerintah sebagai *Ulil amri* berupaya membuat regulasi mengatur tata cara dan prosedur perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UU. Nomor 1 Tahun 1974 berikut berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

¹⁸ Abdul Rahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta: Akademika, 1992), h. 26.

¹⁹ Abdul Rahman, *Op. cit.*, h. 8.

B. Pandangan Secara Biologis dan Psikologi Tentang Masa Dewasa

1. Pandangan secara biologis

Adapun ciri-ciri kedewasaan seseorang secara biologis menurut para Ulama adalah sebagai berikut : para Ulama ahli fiqh sepakat dalam menentukan taklif (dewasa dari segi fisik, yaitu seseorang sudah dikatakan mukallaf atau *baligh*) ketika sudah kelaurl mani (bagi laki-laki), sudah haid atau hamil (bagi perempuan).²⁰ Apabila tanda-tanda itu dijumpai pada seseorang anak laki-laki maupun perempuan maka para fuqaha sepakat menjadikan umur sebagai suatu ukuran, akan tetapi mereka berselisih paham mengenai batas seseorang yang telah dianggap sudah dewasa.

Akan tetapi berdasarkan ilmu pengetahuan kedewasaan seseorang tersebut akan dipengaruhi oleh keadaan zaman dan daerah di mana dia berada, sehingga ada perbedaan percepat lambat nya kedewasaan.

2. Pandangan secara psikologis

Ciri-ciri psikologis yang paling pokok adalah mengenai pola-pola sikap, pola perasaan, pola pikir dan pola perilaku nampak diantaranya :

- a. Stabilitas mulai timbul dan meningkat, pada masa ini terjadi banyak penyesuaian dalam aspek kehidupan.
- b. Citra diri dan sikap pandangan lebih realistis, pada masa ini mulai dapat menilai dirinya sebagaimana adanya, menghargai miliknya, keluarganya, orang lain seperti keadaan sesungguhnya sehingga timbul perasaan puas dan menjauhkannya dari rasa kecewa.

²⁰ Muhammad Ali Assayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam Al-Qur'an* (Terjemahan Muhammad Ali Sabiq, 1983), h. 212

- c. Menghadapi masalahnya secara lebih matang, usaha pemecahan masalah-masalah secara lebih matang dan realistis merupakan produk dari kemampuan berfikir yang lebih sempurna dan ditunjang oleh sikap pandangan yang realistis sehingga diperoleh perasaan yang lebih tenang.
- d. Perasaan menjadi tenang, ketenangan perasaan dalam menghadapi kekecewaan atau hal-hal lain yang mengakibatkan kemarahan mereka, ditunjang oleh adanya kemampuan piker dan dapat menguasai atau mendominasi perasaan-perasaannya serta keadaan yang realistis dalam menentukan sikap, minat dan cita mengakibatkan mereka tidak terlalu kecewa dengan adanya kegagalan yang dijumpainya, kebahagiaan akan semakin kuat jika mereka mendapat proyek respek dari orang lain atau usaha-usaha mereka.²¹

Dari beberapa pendapat tersebut ada suatu muatan terpenting yang ingin penyusun sampaikan yang berkaitan dengan batas usia dalam perkawinan adalah kesiapan secara fisik, ekonomi maupun mental bagi laki-laki maupun perempuan untuk memasuki jenjang kehidupan baru tersebut. Karena itu, suatu ikatan dalam perkawinan akan terbentuk suatu komunitas yang baru dan akan memiliki aturan-aturan yang mempunyai hak dan kewajiban, masing-masing pihak juga harus sadar akan tugas dan kewajibannya, harus toleran dengan pasangan hidupnya, agar terwujud suatu keluarga yang bahagia dan kekal di dunia maupun akhirat atau menjadi keluarga yang sakinah, mawaddha, dan warahmah.

Walaupun demikian, sebagai pedoman umum batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah remaja dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

²¹ Andi Mapreare, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 36-40.

1. Usia 11 tahun adalah usia ketiak pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai nampak (kriteria fisik)
2. Dibanyak masyarakat, usia 11 tahun sudah dianggap akal *baligh*, baik menurut adat maupun agama sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial)
3. Pada masa tersebut sudah mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri (*ego identity*, menurut Erik Erikson), tercapainya fase genital dari perkembangan psikoseksual (menurut Freud) dan tercapainya puncak perkembangan kognitif (Piaget) maupun moral (kohberg) (kriteria psikologis).
4. Batas usia 24 merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri dari pada orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa (secara adat / tradisi), belum bias memberikan pendapat sendiri dan sebagainya. Dengan perkataan lain, orang-orang yang sampai batas usia 24 tahun belum dapat memenuhi persyaratan kedewasaan secara social maupun psikologis, masih dapat digolongkan remaja. Akan tetapi, dalam kenyataannya cukup banyak pula orang yang mencapai kedewasaannya sebelum usia tersebut.
5. Dalam definisi diatas, status perkawinan sangat menentukan, karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat kita pada umumnya. Seorang yang sudah menikah, pada usia berapapun dianggap dan

diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga.²²

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan di masa umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Perkawinan di Bawah Umur

Usia perkawinan dalam pemikiran hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai *baligh* antara kedua calon suami isteri, inheren dengan syarat-syarat dan rukun perkawinan. Salah satu syarat sah perkawinan adalah mencapai usia *baligh*, sehingga secara tegas harus memenuhi ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.²³

Adapun ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dalam al-Quran, yaitu Q.S. Al-Nur Ayat 32 dan Q.S. An-Nisa' ayat 6 :

²² Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011), h. 18-19.

²³ Andi Syamsu Alam, *op. cit*, h.57.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ط
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا^ط وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^ط فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Terjemahannya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).²⁴

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ^ط إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Terjemahannya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁵

Dalam tafsir *al-misbah*, makna kata dasar *rushdan* dalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini lahir kata *rushd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Al-Maraghi menafsirkan dewasa (*rushdan*), yaitu apabila seseorang mengerti dengan

²⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.6.

²⁵ *Ibid.*,

baik cara menggunakan harta serta memebelanjakannya, sedang yang dimaksud *balighu al-nikdh* ialah jika umur telah siap untuk menikah. Ini artinya al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu.

Berdasarkan penafsiran kedua ayat di atas, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditentukan dengan mimpi dan *rushdan*, akan tetapi *rushdan* dan umur kadang-kadang tidak sama dan sukar ditentukan, seseorang yang telah bermimpi ada kalanya belum *rushdan* dalam tindakannya. Hal ini dapat dibuktikan dalam perbuatan sehari-hari, karena kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur dan dapat pula dengan tanda-tanda.²⁶

Secara eksplisit para fuqaha' tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun ia berpandangan bahwa *baligh* bagi seseorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya, dengan alasan beberapa pendapat madhab berikut.

Ketentuan *baligh* maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fuqaha', bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapim Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Shafi'i dan hambali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum *baligh*), demikian juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibn Hazm dan Shubrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapat izin dari padanya.²⁷

²⁶ Dedy Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Al-Fikriis, 2009) h.23.

²⁷ Dedy Supriyadi dan Mustofa, *op.cit.*, h. 24.

Dan berdasarkan pendapat Sarloto W. Sarwono bahwa batas usia dewasa bagi laki-laki 25 dan bagi perempuan 21 tahun, karena kedewasaan seseorang tersebut dikatakan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa batasan usia dikatakan di bawah umur ketika seseorang kurang dari 25 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 20 tahun bagi perempuan. Sedangkan kata di bawah umur mempunyai arti bahwa belum cukup umur untuk menikah.

Dari segi psikologi, sosiologi maupun hukum Islam perkawinan di bawah umur terbagi menjadi dua kategori yaitu pertama, perkawinan di bawah umur asli yaitu perkawinan di bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutup perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Kedua, perkawinan di bawah umur palsu yaitu perkawinan di bawah umur yang hakekatnya dilakukan sebagai kamufase dari kejahatan perilaku kedua mempelai, perkawinan ini hanya untuk menutupi perilaku zina yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai. Hal ini berarti, antara anak dan kedua orang tua bersama-sama untuk menipu masyarakat dengan cara melangsungkan perkawinan yang mulai dengan maksud dengan menutupi aib yang telah dilakukan oleh anaknya. Dan mereka berharap agar masyarakat untuk mencium “bau busuk” yang telah dilakukan oleh anaknya bahkan sebaliknya.²⁸

Sedangkan pengertian perkawinan *baligh* nikah dalam hukum Islam seperti yang diterapkan oleh ulama fiqh adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang

²⁸ Abu Al Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravansa* (Bandung: Mujahid Press, 2002), h. 20.

siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis. Akan tetapi, dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis dan psikis.

Secara ekonomis berarti sudah mampu mencari atau member nafkah dan sudah mampu membayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsure diatas (kemampuan biologis, ekonomis, dan psikis), karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.²⁹

Perkawinan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologi saja yang bersifat seksual akan tetapi, perkawinan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya maka perkawinan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebutkan diatas dengan kemampuan tersebut maka, akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

²⁹ UUP. *op.cit*, pasal 7 ayat 1.

BAB IV
ANALISA PERKAWINAN DI DESA TANAH TOWA
KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA

A. Analisa Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur. Seperti yang di bahas oleh penulis pada Bab II antara lain :

1. Perkawinan atas Kehendak Orang Tua

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang disebabkan faktor orang tua yang menikahkan anaknya dengan paksa atau dengan memalsukan umurnya. Sebenarnya itu merupakan tindakan kurang bijaksana menurut Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Walaupun orang tua (wali) mempunyai hak untuk menikahkan anaknya dengan paksa, tapi mereka (orang tua / wali) tidak sewenang-wenang untuk menentukan pilihan tanpa harus memilih pertimbangan dahulu dari anak-anaknya.

Agar terjadi kemaslahatan umur dalam melakukan perkawinan yang benar-benar berdasarkan atas suka sama suka tanpa paksaan dari orang tua, karena yang demikian akan menimbulkan rasa tanggung jawab atas diri masing-masing.

Menurut penulis proses perkawinan harus lewat kerelaan atau persetujuan dari kedua orang calon mempelai (menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun

1974 Pasal 6 ayat (2)) karena setiap perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan akan menimbulkan akibat yang sangat rawan atau sensitive untuk membina kehidupan rumah tangga sehingga menyebabkan tujuan perkawinan tidak tercapai.

Sedangkan hukum Islam memang mengakui adanya hak ijab yang dimiliki oleh orang tua (wali) untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Kenyataan yang terjadi di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, anak yang dinikahkan secara biologis sudah dikatakan baligh, karena mereka pada umumnya telah mengalami tanda-tanda kedewasaan, seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Sedangkan umur ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) . namun karena psikologis calon mempelai tersebut belum tentu dewasa karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1).

Hak perwalian orang tua yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 50 ayat (1) yang bunyinya bahwa “ anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan walinya.

Tetapi kenyataan yang terjadi pada masyarakat di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, pada umumnya wali nikah dari perempuan adalah orang tua keduanya sendiri selama ia masih hidup. Sementara itu, ada juga orang tua kandung tidak mau menjadi wali nikah anaknya dan diserahkan kepada keluarga lainnya.

2. Faktor Kemauan Anak

Faktor atas kemauan anak dalam perkawinan di bawah umur menurut pengamatan penulis, karena adanya pengaruh lingkungan disekitarnya. Dikarenakan banyak anak-anak yang seusianya atau teman-teman mereka yang sudah menikah, dan akhirnya merekapun terpengaruh untuk ikut-ikutan menikah disebabkan mereka takut dikatakan tidak laku.

Faktor kemauan anak ini terkadang bukan keinginan sendiri atau panggilan dari nalurinya, namun dipengaruhi oleh faktor dari luar seperti keinginan atau rayuan dari orang tua dan cibiran dari masyarakat disekitarnya. Dan faktor kemauan anak itu masih ada hubungannya dengan hak ijbar (orang tua/wali) yang menjadi pembela keduanya adalah siapa yang berhak menentukan pilihannya. Jika atas kemauan anak, maka anak itu sendiri yang menentukan pilihannya, sedangkan orang tua hanya bersikap pasif saja, jika hak ijbar atau perjodohan orang tua, maka yang berhak menentukan pilihan adalah orang tuanya.

3. Faktor Adat dan Budaya

Praktek perkawinan di bawah umur yang ada pada masyarakat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang, menurut penulis merupakan tradisi yang sudah dalam beberapa keluarga. Dengan adanya anggapan-anggapan masyarakat tentang arti sebuah perkawinan, yang menurut mereka merupakan suatu hal yang sangat berarti dalam kehidupan masyarakat tanpa melihat hakekat dan tujuan sebuah perkawinan yang lebih dalam lagi, dimana hal itu akan membawa mereka kepada suatu paradigma yang sebenarnya menyulitkan mereka, seperti adanya anggapan-anggapan masyarakat bagi anak yang belum menikah dengan kata-kata tidak laku, perawan tua, sok jual

mahal dan lain-lain. Dan semua itu merupakan bagi seorang wanita yang lama mendapatkan jodoh atau lama menikahinya.

Adanya tradisi ini tidak mudah diubah dengan adanya semangat pendidikan dan kesadaran agama yang tinggi serta peningkatan ekonomi, karena tidak bertentangan dengan agama Islam yang membolehkan atau menganjurkan umatnya untuk segera menikah, jika sudah mempunyai kemampuan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak melarang mutlak. Ini terbukti karena Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kelonggaran untuk perkawinan di bawah umur yaitu dengan jalan meminta dispensiasi dari Pengadilan Agama (PA).

Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mutlak dalam memberikan suatu ketentuan, sehingga tidak heran jika banyak terjadi pelanggaran, lebih-lebih fase umur perkawinan, yang terjadi di masyarakat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Dan nampak jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai Undang-Undang positif belum mampu mengakomodasi semua permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan belum nampak jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai Undang-Undang positif mampu mengatur masyarakat untuk menjadi lebih baik. Akibatnya kemudian masyarakat lebih percaya pada hukum adat yang sudah mengatur didalam masyarakat.

Suatu kenyataan yang dapat kita lihat dari adanya perkawinan di bawah umur yang dilakukan dimasyarakat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang, perkawinan tersebut banyak dilakukan karena pengaruh adat, walaupun sebagian dari masyarakat

sudah tahu dengan adanya batasan usia perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidaklah menjadi batu penghalang bagi mereka untuk melakukan perkawinan.

4. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Menurut penulis adalah merupakan suatu kewajiban, karena pada umumnya seseorang yang berpendidikan rendah akan berpikir sempit dan kurang maju serta jauh dari pertimbangan-pertimbangan.

Namun sebaliknya, orang yang berpendidikan tinggi akan mempunyai pola berpikir yang lebih luas dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan untuk menentukan keputusan melalui pemikiran yang matang dan jeli, apalagi dalam menentukan suatu perkawinan dimana perkawinan tersebut adalah suatu pondasi dari kehidupan masyarakat. Namun, secara logika bahwa perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berilmu atau berpendidikan akan lebih bijaksana dalam bertindak laku dan berpikir sehingga tujuan dari perkawinan akan lebih mudah tercapai.

Dengan demikian, maka pelaksanaan perkawinan di bawah umur suatu bukti bahwa mereka yang belum bisa berpikir secara bijaksana dan luas, karena mereka melakukan perkawinan di bawah umur rata-rata berpendidikan rendah.

Akibat dari sempatnya pola pikir mereka dan kurangnya pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan perkawinan maka akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga, dan jika didalam rumah tangganya menemukan permasalahan-permasalahan mereka tidak dapat memecahkan secara sendiri, dan melibatkan orang tua atau pihak ketiga.

5. Faktor ekonomi

Adanya faktor ekonomi dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur dimasyarakat di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang menurut penulis, lebih merupakan pelengkap dan bukan merupakan tujuan utama untuk menikahkan anaknya, karena dalam kenyataan yang ada mereka yang sudah berkeluarga atau sudah berumah tangga, ekonominya masih tergantung kepada orang tuanya. Hal ini terbukti, karena mereka belum mempunyai kemampuan ekonomi dan kematangan jiwa.

Dari praktek perkawinan di bawah umur tersebut semata-mata hanya tujuan orang tua agar mereka bahagia dan lega karena sudah menikahkan anaknya, walaupun secara ekonomi masih bergantung kepada orang tua.

Namun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) dan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

Dengan demikian, jelas bahwa sebenarnya orang tua sudah tidak punya kewajiban lagi untuk memelihara dan mendidik, lebih-lebih memberi nafkah karena Ia sudah menikah. Akan tetapi, yang terjadi dimasyarakat pada umumnya orang tua masih ikut campur dalam ekonomi rumah tangga anaknya.

Menurut penulis hal yang seperti itu, akan membuat anak tersebut lambat untuk berfikir dewasa dan kurang bertanggung jawab dan akan menjadikan anak sulit untuk cepat mandiri, juga melalaikan keluarganya.

Dari ketergantungan ekonomi bagi mereka yang sudah berkeluarga, juga dapat menjadi pendorong bagi anak-anak untuk segera menikah karena mereka merasa diperhatikan dan kesempatan menguntungkan bagi yang malas bekerja. Dapat kita lihat bahwa perkawinan tersebut hanya sekedar untuk melampiaskan nafsu belaka, dan tanpa terbebani oleh tanggung jawab dalam memberi nafkah kepada keluarga.

Akan tetapi perlu menulis ingatkan bahwa ada juga mereka yang menikah di usia di bawah umur karena tidak bias melanjutkan sekolah disebabkan tidak mempunyai biaya dan kurangnya dorongan dari orang tua, akhirnay mereka terpaksa harus menikah agar tidak menjadi bahan pembicaraan atau gunjingan masyarakat.

6. Faktor agama

Masyarakat Desa Tanah Towa pada umumnya menganut agama Islam. Akan tetapi, mereka belum sepenuhnya menjalankan rukun islam.

Selain itu, faktor agama juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena dalam Islam tidak ada larangan perkawinan di bawah umur sehingga sebagian masyarakat berpendapat hal itu merupakan tindakan semata-mata untuk melestarikan sunnah Rasulullah dan masyarakat menjadikan perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah sebagai pedoman bagi mereka dalam melakukan perkawinan.

Bagi masyarakat perkawinan bukanlah merupakan hal yang sulit dan bukan termasuk perbuatan dosa, jika harus melanggar Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, mengenai batas usia perkawinan. Disamping itu, juga masyarakat kurang mengenal tentang aturan-aturan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut.

Adapun perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah yang dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam melaksanakan perkawinan di bawah umur. Menurut penulis disebabkan karena mereka tidak mengerti atau tidak tahu hikmah dibalik perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah.

Lebih lanjut penulis melihat bahwa praktek perkawinan di bawah umur tersebut lebih cenderung sebagai tradisi ketimbang komite religious dalam rangka melestarikan keteladanan perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah, namun hal ini tidak mudah dihilangkan oleh semangat pendidikan, peningkatan ekonomi atau undang-undang formal.

Meskipun telah mulai peningkatan pendidikan di Desa Tanah Towa seperti sarjana-sarjana muda semakin banyak dan semakin banyaknya berdiri sekolah. akan tetapi, mereka masih banyak yang terbukti melakukan perkawinan di bawah umur dimasyarakat.

Menurut penulis bahwa perkawinan di bawah umur dalam konteks sekarang kurang atau bahkan tidak cocok lagi untuk dilaksanakan, karena dalam mengemudikan bahtera rumah tangga akan menimbulkan berbagai masalah yang harus dihadapi apalagi di era globalisasi sekarang ini, di mana persaingan begitu ketat terutama di bidang ekonomi.

Walaupun secara yuridis perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dianggap sah, hanya saja dari segi kedewasaan (psikologi) atau sosiologi ekonomi masih diragukan dan akan menimbulkan permasalahan yang kompleks nantinya dalam kehidupan rumah tangganya.

Sejalan dengan ajaran Islam, menganjurkan perkawinan bagi mereka yang sudah mampu tanpa member batasan usia, akan tetapi Islam juga menganjurkan hendaknya dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai kemampuan baik dari berbagai aspek kehidupan juga kemampuan yang dipengaruhi oleh adanya kedewasaan dan kematangan baik jiwa dan umur seseorang, walaupun tidak selamanya.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis berdasarkan kenyataan yang ada bagi mereka yang melakukan perkawinan di usia di bawah umur masih jauh dari taraf kematangan (mayoritas) baik secara fisik biologis, mental, psikologis dan ekonomi.

B. Analisa Dampak Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang di idealkan oleh ketentuan yang berlaku di mana perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan di usia muda merupakan bentuk penyimpangan dari perkawinan yang telah ditetapkan.

Secara sederhana bahwa perkawinan usia di bawah umur mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warohmah, apabila dibandingkan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

Hal ini tidak berarti bahwa perkawinan usia di bawah umur dapat dipastikan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, karena perkawinan yang memenuhi persyaratan usiapun pada kenyataannya, tidak semuanya dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan diatas. Namun demikian, perkawinan usia

muda jelas beresiko lebih besar daripada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan usia. Perkawinan usia muda tidak hanya dapat berdampak positif dan negative terhadap kedua belah pihak mempelai.

Dari hasil wawancara dari 10 responden selaku pelaku perkawinan di bawah umur, dapat dilihat dampak perkawinan di bawah umur sebagaimana yang terdapat dalam table berikut ini :

TABEL VI
DAMPAK-DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

No.	Dampak Perkawinan Di Bawah Umur	Jumlah
1.	Proses persalinan istri	
	a. Lancar melalui proses alami	6 Orang
	b. Melalui operasi	4 Orang
2.	Kesehatan Ibu setelah melahirkan	
	a. Baik	6 Orang
	b. Tidak baik	4 Orang
3.	Kesehatan anak	
	a. Baik	7 Orang
	b. Tidak baik	3 Orang
4.	Masalah pendidikan dan pengajaran anak	
	a. Di serahkan orang lain	2 Orang
	b. Di didik sendiri	8 Orang
5.	Pengetahuan mengenai merawat anak	
	a. Sudah cukup	7 Orang

	b. Belum cukup	3 Orang
6.	Cara menyelesaikan masalah keluarga	
	a. musyawarah	6 Orang
	b. menggunakan pihak ketiga	4 Orang
7.	Ekonomi keluarga	
	a. bekerja sendiri	7 Orang
	b. menggantungkan orang tua	3 Orang

Hasil Wawancara terhadap 10 responden selaku pelaku perkawinan di bawah umur.

Masalah proses persalinan istri dari 10 responden ternyata 6 responden dalam proses persalinan lancar melalui proses alami sedangkan 4 responden lainnya melalui operasi. Kesehatan ibu setelah melahirkan dari 10 responden ternyata 6 responden kesehatan setelah melahirkan baik, 4 responden ternyata kesehatan setelah melahirkan tidak baik. Sedangkan dari 10 responden, ternyata 8 responden mengatakan kesehatan anak mereka baik dan 2 responden mengatakan tidak baik.

Masalah pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dari 10 responden ternyata 2 responden menyerahkan pendidikan dan pengajaran anaknya kepada orang lain, karena mereka bekerja di luar Daerah dan kurang paham bagaimana cara mendidik anak sedangkan 8 responden lagi, masalah pendidikan dan pengajaran terhadap anak dididiknya sendiri karena sudah siap dan paham bagaimana cara mendidik seorang anak.

Pengetahuan bagaimana cara merawat seorang anak dari 10 responden, 7 responden sudah tahu bagaimana cara merawat seorang anak karena banyak Tanya kepada orang lain bagaimana cara merawat anak dan 3 responden lainnya belum

begitu paham bagaimana cara merawat anak karena mereka sendiri masih terlalu kecil untuk merawatnya.

Sedangkan penyelesaian masalah yang terjadi dalam keluarga mereka ada yang menyelesaikan secara musyawarah dan ada juga yang memerlukan pihak ketiga. Dari 10 responden, 6 responden yang menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan 4 responden lainnya menyelesaikan masalah dibantu pihak ketiga, yaitu orang tua mereka sendiri. Karena tanpa pihak ketiga masalah dalam keluarga mereka tidak selesai-selesai juga.

Akan tetapi, masalah perekonomian dalam keluarga mereka ada yang sudah bekerja sendiri dan ada juga yang menggantungkan kepada orang tua mereka. Dari 10 responden, 7 responden sudah dapat memenuhi kebutuhan perekonomian dan diri mereka sendiri. Karena mereka sudah bekerja baik kerja sebagai petani, buruh atau lainnya. 3 responden lagi masih menggantungkan perekonomian mereka kepada orang tua, karena mereka belum kerja dan orang tua mereka selalu memberikan apa yang di minta oleh anaknya.

Berdasarkan dari sebelumnya, penulis menilai bahwa rumah tangga yang dibangun oleh anak-anak yang masih di bawah umur yang terjadi di masyarakat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang. Meskipun dampak positif relative besar dibandingkan dengan dampak negative yang hanya terjadi pada beberapa pasangan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga yang ditimbul karena percekcoan, cemburu yang berlebihan, adanya sikap keras suami terhadap isteri, kurang pengetahuan dari pihak isteri dalam cara pendidikan pengajaran anak, penegetahuan mengenai merawat anak dan akhirnya akan menyebabkan lemahnya mental anak-anak dilahirkan, kemiskinan rohani dan jasmani dan sebagainya.

Sedangkan dampak positif dari perkawinan di bawah umur yang didapati dalam kehidupan rumah tangga beberapa pasangan suami isteri. Karena tujuan mereka pada saat melaksanakan perkawinan di bawah umur adalah untuk mencegah dari perbuatan zina dan kemaksiatan diantara mereka dan diawali dengan niat yang suci sehingga khidupan rumah tangga mereka tidak mudah di ombang-ambing oleh masalah yang ada, dikarenakan adanya rasa tanggung jawab dan rasa kasih sayang diantara anggota keluarga dan dapat dengan mudah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

Dengan adanya kematangan jiwa dan raga serta kematangan ekonomi harus sudah ada sebelum perkawinan jika tidak ada maka rumah tangga yang dibangunnya akan mudah terombang-ambing oleh setiap permasalahan yang setiap kali muncul dalam kehidupan berumah tangga, sehingga masa depan akan suram.

Dalam Undang-Undang juga menganut beberapa asas yang prinsip berhubungan dengan perkawinan. Adapun asas-asas tersebut anatra lain :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan disamping itu setipa perkawinan harus dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

3. Undang-Undang perkawinan ini menganut monogamy, hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan mengizinkan maka seseorang suami dapat beristeri lebih dari satu orang.
4. Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama dengan suami isteri.¹

Dengan demikian pada dasarnya pelaksanaan perkawinan bukan hanya untuk kesenangan atau kebahagiaan sementara dan tidak hanya merupakan pemenuhan kebutuhan biologis belaka, akan tetapi untuk kebahagiaan yang kekal abadi dan harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Karena itu, perpisahan atau perceraian dalam ikatan perkawinan merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm 46-47.

C. Solusi Penyelesaian Masalah Perkawinan di Bawah Umur

Pada dasarnya perkawinan merupakan fitrah manusia, yang dianjurkan juga oleh setiap agama manapun untuk meneruskan proses reproduksi dan kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi, perkawinan yang dilaksanakan sebelum waktunya, yang disebut dengan perkawinan di bawah umur memiliki banyak kemudratan (hal-hal keburukan), seperti: kurang dewasa secara biologis dan psikologis pasangan nikah, buruk untuk kesehatan bagi perempuan yang secara biologis belum dewasa, dan terputusnya peluang berekspresi, berkreasi, memperoleh pendidikan yang layak.

Usia yang melaksanakan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, merupakan perempuan yang berumur di atas 16 tahun dan laki-laki yang berumur di atas 19 tahun.²

Peran orang tua sangat penting karena dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.³

Selain itu, Peran serta pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting karena untuk lebih meningkatkan pengawasan, memberi bimbingan kepada generasi muda dan mensosialisasikan pencegahan perkawinan tersebut, agar angka perkawinan dibawah umur dapat ditekan dan tidak mengalami peningkatan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat setiap tahunnya.

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan & UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h.5.

³ Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sudah saatnya pemerintah daerah dan dinas terkait memberikan pendidikan pranikah atau yang lebih dikenal dengan pendidikan sex kepada generasi muda yang ada agar mereka mengerti akan bahaya yang menimpa bila melakukan sex bebas dan nantinya mereka memiliki persiapan yang matang untuk pernikahan bila telah lulus sekolah atau kuliah.⁴

Ada beberapa solusi yang dapat penulis kemukakan dalam penyelesaian masalah perkawinan di bawah umur, yaitu:

1. Penyuluhan Hukum.

Penyuluhan hukum utamanya ditujukan kepada orang tua dan anak-anak. Dan kepada anak-anak bentuknya bukan seperti seminar yang membosankan, tetapi melalui permainan yang lebih kreatif dan komunikatif. Sehingga pesan dari penyuluhan hukum ini bisa sampai.

Penyuluhan hukum, juga menggabungkan dengan aspek-aspek kesehatan dan psikologis jika terjadi pernikahan dini. Dengan penyuluhan maka, akan tumbuh kesadaran masyarakat untuk menikah di usia matang.

2. Pemanfaatan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Berkembangnya lembaga kemasyarakatan sebagai kader dan corong pembangunan, tentu bisa juga turut mengembangkan kesadaran hukum khususnya kesadaran masyarakat untuk menikah di usia matang.

Lembaga-lembaga yang selama ini telah berhasil menggiatkan masyarakat dalam berbagai sektor, juga bisa kita minta peran sertanya untuk membangun kesadaran akan pentingnya menikah di usia matang.

⁴ Erlinda S Wasito, "Stop Pernikahan di Bawah Umur", *blog.Kompasiana.com*. <http://Sosbud.kompasiana.com/>. Kota Makassar. Html (25 Juli 2011).

Model peran serta lembaga kemasyarakatan tentu harus disiapkan secara matang, lagi-lagi bukan semacam pelajaran di kelas, yang urang bisa berdampak. Tetapi mungkin berbentuk “simulasi” sehingga memudahkan masyarakat memahami dari program tersebut.

3. Membuat gerakan bersama: Menikah di usia matang.

Ini hal yang paling sulit jika dilakukan secara bersama. Tetapi menjadi mudah dan ringan jika dimulai dari lingkup terkecil. Dari diri sendiri, dari lingkungan keluarga kecil, dari lingkungan keluarga yang lebih luas hingga tentu meyebar.

Hal ini tentu dimulai dengan rasa tanggung jawab diri, menjadi tanggung jawab bersama, bahwa hal yang besar tentu dimulai dari hal yang kecil. Sehubungan dengan hal tersebut, keberhasilan dan efektivitasnya tindakan Pemerintah mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah tangan harus dipertautkan dengan sub sistem yang lain. Hal ini penting, karena setiap sistem dan sub sistem dapat saling pengaruh mempengaruhi. Efektif atau tidak efektifnya penegakan hukum perkawinan bukanlah persoalan retorika, karena baik secara teoretik maupun secara empirik tidak dapat disangkal kemungkinan adanya berbagai faktor yang berpengaruh.

Mengantisipasi berbagai kemungkinan berkenaan adanya berbagai faktor berpengaruh dalam rangka pelaksanaan perkawinan dibawah umur, diharapkan agar segenap aparat penegak hukum termasuk para Kepala Kantor Urusan Agama dan Penghulu (PPPN) dapat menjadi aparatur negara yang berkualitas, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setidak-tidaknya para atasan, pejabat dan petugas pencatat nikah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 1983 : 4):

- a. Pemberian teladan kepatuhan hukum oleh aparat penegak hukum.
- b. Sikap yang lugas dari para penegak hukum.
- c. Penyesuaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi mutakhir.
- d. Penerangan dan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku terhadap masyarakat.
- e. Memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang baru dibuat.

Lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto (1983 : 5) mengungkapkan, bahwa patut pula memperhatikan faktor lain yang sering mempengaruhi para aparat penegakan hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan.

Di antara kelima faktor tersebut, tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Untuk itu perlu dianalisis lebih lanjut dengan berpijak dari suatu kerangka konseptual, serta tetap mengacu pada norma atau kaidah hukum yang termuat dalam UU. Nomor 1 Tahun 1974 juncto PP. Nomor 9 Tahun 1975 juncto Kompilasi Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

Setelah mengadakan pembahasan dan penelitian dari bab 1 sampai 4, maka dalam mengakhiri skripsi tentang perkawinan dibawah umur menurut hukum Islam dan di Desa Tanah Towa kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba. Penulis akan memberi kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

Dari uraian bab perbab sebelumnya, penulis mengambil beberapa pokok yang dapat menjadikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu faktor adat dan budaya, faktor ekonomi, faktor agama, faktor pendidikan, faktor dijodohkan oleh kedua orang tua, dan faktor kemauan anak.
2. Perkawinan di bawah umur ditinjau dari hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai *baligh* antara antara kedua calon suami-isteri, sebagaimana secara tegas dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) Sedangkan perkawinan di bawah umur ditinjau dari hukum adat tidak menentukan batasan usia atau umur tertentu bagi orang yang melaksanakan perkawinan.
3. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur, yaitu berdampak positif dan negative terhadap kedua belah pihak mempelai seperti

dalam kehidupan rumah tangga baik kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Selain itu juga, adanya upaya pencegahan perkawinan di bawah umur.

B. Saran-Saran

Berkenaan dengan beberapa kesimpulan di atas, dipandang perlu diajukan saran sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dalam rangka menekan terjadinya perkawinan dibawah tangan di Kecamatan Kajang, sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi tujuan perkawinan maka perkawinan tersebut seharusnya dilaksanakan dengan adanya persiapan mental, spiritual dengan niat-niat suci. Dalam hal ini mewujudkan keluarga yang sakinah, mawahdah dan warahmah
2. Pemerintah yang berwenang perlu secara rutin melakukan penyuluhan dengan tokoh agama dan masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan menyangkut hukum adat setempat terutama pasal 7 ayat (1) yaitu usia perkawinan harus dipahami secara baik, agar tidak melakukan diskriminasi perkawinan dalam lingkungan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademika, 1992.
- Abidin Abubakar, Zainal. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. Keempat. Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikmah, t.t, 2001.
- Abidin, Slamet dan Amiruddin. *Fiqih Munakahat I*. Cet. Pertama. Bandung: C.V. Pustaka Setia, 1999.
- Alam, H. Andi Syamsu. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. Cet. Pertama. Jakarta Selatan: Kencana Mas, 2005.
- Al-Gazali, Shalih bin Ahmad. *Ensiklopedia Pengantin*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Ali Assayis, Muhammad. *Tafsir Ayat Al Ahkam Al-Qur'an*, Terjemahan Muhammad Ali Sabiq, 1983.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Raneka Cipta, 1993.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Cet. IV. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.
- Haar, Ter. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Paradia Paramita, 1987.

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Ichan, Ahmad. *Hukum Perkawinan bagi yang beragama Islam; Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*. Jakarta: Paradia Paramita, 1986.
- Idris, M. Ramulyo. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind. Hild, 1985.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. Kedua. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.
- Sanusi, Nur Taufiq. *Fikih Rumah Tangga, Perspektif al-Qur'an dalam Mengelolah Konflik Menjadi Harmoni*. Depok: Elsas, 2010.
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Cet. Ke-2 Bandung: Alfabeta, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soemiyati, Ny.,. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Supriady, Dedy dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Al-Fikriis, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. Ketiga. Jakarta: Kencana, 2009.

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Kara Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Makassar: Alauddin Press, 2009.

UU No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan & UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT*. Jakarta: Visimedia, 2007.

W. Sarwono, Sarlito. *Psikologi Remaja*. Cet ke-14. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Udma Laela, S.HI lahir pada tanggal 06 April 1989 di Kalimporo. Dilahirkan dan dibesarkan oleh Kedua Orang Tua yang bernama H. Muh. Saleh Hasan dan Hj. Sitti Fatimah dan merupakan anak ke-4 dari 4 bersaudara.

Tepatnya tanggal 23 Agustus 2011, berhasil menyelesaikan Study dan Program S1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah dan Hukum. Pada awal duduk di kursi pendidikannya di Sekolah Dasar yang bernama SDN 103 Kalimporo pada Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Kajang dan selesai 2007. Dan selanjutnya pada tahun 2007 kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mengambil Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah dan Hukum. Pada Tanggal 23 Agustus 2011 berhasil menyelesaikan Studynya dengan judul skripsi “ **Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum adat di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba**”.

Pengalaman Organisasi yaitu aktif dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syari'ah dan Hukum.